



DISKOPUKM
KOTA BANDAR LAMPUNG

LAKIP

2025

DINAS KOPERASI & UKM
KOTA BANDAR LAMPUNG

KATA PENGANTAR

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembangunan salah satu urusan wajib non pelayanan dasar yaitu Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kota Bandar Lampung secara transparan dan akuntabel, maka telah diterapkan sistem pertanggungjawaban yang sistematis jelas dan terukur melalui rencana Strategis, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja serta Laporan Kinerja pada setiap akhir Tahun Anggaran.

Adapun maksud dan tujuan Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran yang konkrit dan menyeluruh tentang hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan di Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandar Lampung, Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari adanya kekurangan dalam laporan ini. Oleh karena itu, kami berharap mendapat masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan Laporan Kinerja untuk waktu yang akan datang. Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat dan memberikan informasi serta dapat menjadi referensi untuk meningkatkan upaya pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terutama di Kota Bandar Lampung di masa yang akan datang.

Bandar Lampung, Januari 2026

Kepala Dinas Koperasi dan UKM
Kota Bandar Lampung



RIANA APRIANA, Ap.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19750427 199311 2 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah..

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja tahun 2024 adalah capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah yang sudah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja (PK) perangkat daerah tahun n secara berjenjang yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah selaku unsur pembantu Wali Kota khususnya dalam bidang ekonomi, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu

meningkatkan peran serta fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan Daerah. Oleh karenanya, pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) kedepan diarahkan menjadi koperasi modern dan UMKM naik kelas serta untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dengan mendukung pertumbuhan yang berkualitas. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mendukung hal tersebut adalah dengan peningkatan nilai tambah, daya saing, dukungan pemasaran dan perluasan lapangan kerja melalui penguatan koperasi, UMKM, dan kewirausahaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 bertujuan untuk:

1. Sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan;
2. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah pada tahun berikutnya.

1.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang koperasi dan usaha kecil menengah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dibidang Koperasi dan Usaha Mikro berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung Lampung.

Tugas dan Fungsi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung Lampung melalui Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 55 Tahun 2021, telah ditetapkan Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandar Lampung, menyatakan bahwa tugas pokok Dinas Koperasi dan UKM adalah membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil menengah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya;

1.3. Struktur Organisasi

Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut. Sesuai dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 55 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung, maka susunan organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

Susunan organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi:
- c. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan : Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan;
- d. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi: Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan;
- e. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro: Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Pernyetaraan;
- f. Unit Pelaksana Teknis
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

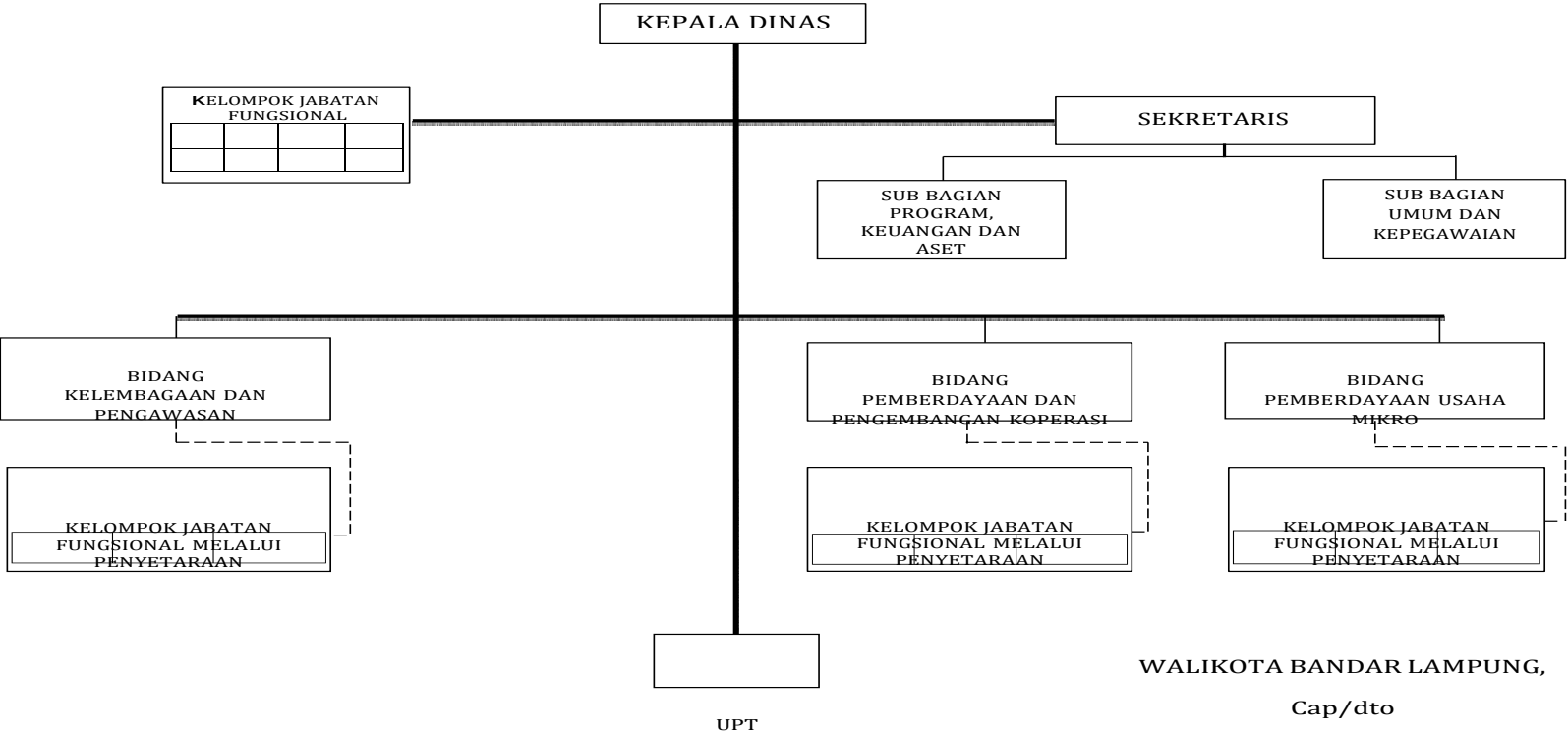
Kelompok Jabatan Fungsional secara tugas dan fungsi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang dikoordinasikan melalui pejabat structural satu tingkat di atasnya. Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja dan pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi

Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 55 TAHUN 2021
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KOTA BANDAR LAMPUNG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA BANDAR LAMPUNG



1.4. Gambaran Sumber Daya Organisasi

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung terdiri dari 19 ASN dan 13 Non ASN dengan jumlah seluruh pegawai adalah 32 (tiga puluh dua) pegawai. Berikut merupakan perincian sumber daya manusia pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung:

Tabel 1.1
Jumlah ASN Dinas Koperasi Dan UKM
Kota Bandar Lampung Berdasarkan Jabatan
periode Januari-Desember 2025

No	Nama Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Kepala Dinas	1	
2	Sekretaris Dinas	1	
3	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan	1	
4	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	1	
5	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro	1	
6	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1	
7	Kasubag Program, keuangan dan Aset	1	
8	Fungsional	5	
9	Staf Pelaksana	7	
10	Non ASN	13	
	JUMLAH	32	

Tabel 1.2.
Komposisi Pegawai menurut Pendidikan Terakhir, Golongan/Pangkat, Eselon dan Diklat yang telah diikuti
Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung

Nama Jabatan	Status Jabatan		Kualifikasi Pendidikan Terakhir										Pangkat/Gol				Pendidikan Pelatihan Struktural			
	Isi	Kosong	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	Non PNS	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
Kepala Dinas	1	-									1					1		1		
Sekretaris Dinas	1	-									1				1					
Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan	1	-								1						1				1
Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	1	-									1					1				
Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro	1	-									1					1				
Kasubag Umum dan Kepegawaian	1	-									1				1					
Kasubag Program, keuangan dan Aset	1	-									1				1					
Fungsional	5	-								5					5					1
Staf Pelaksana	7	-			4					3		13		4	3					5

1.5. Asset

Untuk terlaksananya kegiatan diperlukan pula sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung. Sarana/prasarana yang ada Di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1.3
Sarana dan Prasarana (Posisi 31 Desember 2025)

NO	ASET OPD	SATUAN	KONDISI			TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN
			BAIK	SEDANG	RUSAK		
1	CCTV Chanel / Doorlock	1 Buah	✓			2025	Rp. 21.423.000,00
2	Penghancur Kertas	1 Buah	✓			2025	Rp. 2.775.000,00
3	CHIP DAG PRINTER	1 Set	✓			2025	Rp. 43.499.789,00
4	PRINTER	1 Buah	✓			2025	Rp. 12.765.000,00
5	Filling Kabinet	4 buah	✓			2025	Rp. 11.544.000,00
6	PRINTER	1 Buah	✓			2025	Rp. 4.995.000,00
7	LAPTOP	1 Buah	✓			2025	Rp. 11.932.500,00
11	RAK PRODUK	1 Buah	✓			2024	Rp. 2.950.000,00
12	PORTABLE AUDIO SPEAKER SOUND SYSTEM	1 Unit	✓			2024	Rp. 5.370.000,00
13	KURSI TUNGGU	1 Buah	✓			2024	Rp. 2.980.000,00
14	MEJA DESAIN	1 Buah	✓			2024	Rp. 3.080.000,00
15	MEJA RAPAT	1 Buah	✓			2024	Rp. 9.985.000,00
16	MEJA RAPAT	1 Buah	✓			2024	Rp. 14.950.000,00
17	MEJA MESIN PENGEMASAN	1 Buah	✓			2024	Rp. 2.950.000,00
18	RAK PRODUK	1 Buah	✓			2024	Rp. 2.950.000,00
19	MEJA KERJA STAFF	6 buah	✓			2024	Rp. 21.000.000,00
25	KURSI PUTAR	6 buah	✓			2024	Rp.9.900.000,00
31	PRINTER SCANNER	1 Buah	✓			2023	Rp. 4.300.000,00
32	DESKTOP WORK STATION	1 Buah	✓			2023	Rp. 11.900.000,00
33	LEMARI ARSIP KACA	5 buah	✓			2023	Rp. 17.850.000,00
38	KURSI KERJA	3 buah	✓			2023	Rp. 4.950.000,00
41	MEJA KERJA	3 buah	✓			2023	Rp. 6.600.000,00
44	KURSI TUNGGU	1 Buah	✓			2023	Rp. 2.540.000,00
45	SOFA TAMU	1 Buah	✓			2023	Rp. 13.300.000,00
46	Laptop	1 Buah	✓			2023	Rp. 8.900.000,00
47	WIRELESS	1 Buah	✓			2023	Rp. 9.642.200,00
48	Air Conditioner Floor Standing	1 Buah	✓			2023	Rp. 30.563.100,00
49	LCD Proyektor Infocus	1 Buah	✓			2023	Rp. 9.794.700,00
50	Gorden Vertical Blind	1 Buah	✓			2022	Rp. 2.425.500,00
51	Gorden Vertical Blind	1 Buah	✓			2022	Rp. 2.194.500,00

52	Gorden Vertical Blind	1 Buah	✓			2022	Rp. 1.725.150,00
53	Gorden Vertical Blind	1 Buah	✓			2022	Rp. 3.498.000,00
54	Dekorasi Ruang Rapat	1 Set	✓			2022	Rp. 35.000.000,00
55	Sofa	5 buah	✓			2022	Rp. 9.750.000,00
60	UPS	1 Buah	✓			2021	Rp. 1.600.000,00
61	Printer	1 Buah	✓			2021	Rp. 1.800.000,00
62	Komputer	1 Buah	✓			2021	Rp. 11.500.000,00
63	Sofa 321	1 Buah	✓			2020	Rp. 10.500.000,00
64	Kursi Putar	8 buah	✓			2020	Rp. 15.600.000,00
72	Meja Kerja 1 Biro	8 buah	✓			2020	Rp. 15.600.000,00
80	Kursi Lipat	20 buah	✓			2020	Rp. 11.600.000,00
100	Printer	1 Buah	✓			2019	Rp. 4.700.000,00
101	Laptop	2 buah	✓			2019	Rp. 21.600.000,00
103	komputer	1 Buah	✓			2019	Rp. 9.000.000,00
104	TV	1 Buah	✓			2019	Rp. 9.800.000,00
105	Filing Cabinet	1 Buah	✓			2019	Rp. 2.500.000,00
106	Rak Arsip	1 Buah	✓			2019	Rp. 2.750.000,00
108	Meja Tulis 1 Biro	10 buah	✓			2018	Rp. 23.000.000,00
118	Filling Kabinet	4 buah	✓			2018	Rp. 10.800.000,00
122	Rak Arsip	3 buah	✓			2018	Rp. 8.400.000,00
125	Almari	3 buah	✓			2018	Rp. 9.000.000,00
129	Komputer	1 Buah	✓			2019	Rp. 9.000.000,00
130	Rak Arsip	2 buah	✓			2019	Rp. 5.500.000,00
131	Komputer	1 Buah	✓			2019	Rp. 9.000.000,00
132	Komputer	1 Buah	✓			2019	Rp. 8.400.000,00
133	Filing Cabinet	3 buah	✓			2019	Rp. 7.500.000,00
135	Filling Kabinet	2 buah	✓			2017	Rp. 5.950.000,00
136	Mini Bus Kepala Dinas	1 Buah	✓			2017	Rp. 209.920.000,00
138	Lemari	3 buah	✓			2019	Rp. 12.300.000,00
139	Switch	1 Buah	✓			2018	Rp. 890.000,00
140	Router	1 Buah	✓			2018	Rp. 1.080.000,00
141	Printer	3 buah	✓			2018	Rp. 7.425.000,00
142	Note book	3 buah	✓			2018	Rp. 29.250.000,00
146	Komputer PC	2 buah	✓			2018	Rp. 13.940.000,00
147	kursi putar	10 buah	✓			2018	Rp. 24.000.000,00
153	Mesin Absen	1 Buah	✓			2018	Rp. 4.500.000,00
162	Komputer	1 Buah	✓			2017	Rp. 7.000.000,00
163	Printer	1 Buah	✓			2017	Rp. 2.300.000,00
164	Meja Kerja	1 Buah	✓			2017	Rp. 1.750.000,00
165	Kursi Lipat	11 buah	✓			2017	Rp. 4.620.000,00
176	Kursi Putar	6 buah	✓			2017	Rp. 8.850.000,00
182	Lemari	2 buah	✓			2017	Rp. 9.250.000,00
184	PC	1 Buah	✓			2017	Rp. 7.480.000,00
185	Kursi Putar Sekretariat	5 buah	✓			2017	Rp. 6.000.000,00
190	Meja Kerja 1/2 Biro	3 buah	✓			2017	Rp. 4.485.000,00
193	Meja Kerja 1 Biro	3 buah	✓			2017	Rp. 22.371.000,00
196	Printer	1 Buah	✓			2017	Rp. 1.500.000,00
197	UPS	1 Buah	✓			2017	Rp. 1.300.000,00
198	Notebook	1 Buah	✓			2017	Rp. 5.525.000,00
199	Komputer P.C	2 buah	✓			2017	Rp. 14.450.000,00
201	Kipas Angin	2 buah	✓			2017	Rp. 1.495.000,00
203	Kursi Putar	11 buah	✓			2017	Rp. 16.445.000,00

214	Meja Kerja 1/2 Biro Sekretariat	2 buah	✓			2017	Rp. 3.000.000,00
216	Printer	1 Buah	✓			2017	Rp. 1.550.000,00
217	Komputer Unit	1 Buah	✓			2017	Rp. 7.350.000,00
218	Kipas Angin	4 buah	✓			2017	Rp. 1.400.000,00
222	Kursi Putar	5 buah	✓			2017	Rp. 7.500.000,00
227	Meja Kayu	1 Buah	✓			2017	Rp. 8.250.000,00
228	Faximile	1 Buah	✓			2017	Rp. 2.500.000,00
229	Filling Kabinet	1 Buah	✓			2017	Rp. 2.300.000,00
230	Almari Arsip	1 Buah	✓			2017	Rp. 4.000.000,00
231	Kendaraan Dinas Roda Dua	1 Buah	✓			2017	Rp. 15.500.000,00
232	Komputer	1 Buah	✓			2017	Rp. 5.900.000,00
233	Kursi Putar Staf	2 buah	✓			2017	Rp. 1.400.000,00
235	Kursi Putar	4 buah	✓			2017	Rp. 2.000.000,00
239	Meja Kerja	3 buah	✓			2017	Rp. 3.600.000,00
242	Almari	1 Buah	✓			2017	Rp. 3.000.000,00
243	Kursi Putar Staf	1 Buah	✓			2017	Rp. 5.200.000,00
244	Kursi Sofa	1 Buah	✓			2017	Rp. 5.250.000,00
245	Kipas Angin	1 Buah	□	✓		2017	Rp. 670.000,00
246	Kendaraan Dinas Roda Dua	2 unit	✓			2017	Rp. 26.900.000,00
248	Meja kerja	5 buah	✓			2017	Rp. 1.787.500,00
253	Kendaraan Dinas Roda Dua	2 unit	✓			2017	Rp. 24.000.000,00
255	Meja Komputer	1 Buah	□	✓		2017	Rp. 325.000,00
256	Filing Cabinet	7 buah	□	✓		2017	Rp. 4.550.000,00
261	Televisi	1 Buah		✓		2017	Rp. 780.000,00
262	Lemari Besi	5 buah		✓		2017	Rp. 4.875.000,00
269	KURSI LIPAT	10 buah	✓			2023	Rp.3.850.000,00
280	KURSI RAPAT	20 buah	✓			2024	Rp.11.200.000,00
300	PAPAN	1 Buah	✓			2024	Rp.380.000,00
301	KURSI LIPAT	35 buah	✓			2024	Rp.10.325.000,00
335	KURSI RAPAT	12 buah	✓			2024	Rp.4.140.000,00
347	KERANJANG INDUSTRI	4 buah	✓			2024	Rp.1.980.000,00
352	Kursi Lipat	20 buah	✓			2022	Rp.9.600.000,00
372	Kursi Lipat	18 buah	✓			2025	Rp.11.988.000,00
391	Tanah Untuk Kantor Disnaker Kota Bandar Lampung	meter	✓			2012	Rp 992.000.000
392	Pembangunan Gedung Sentra UKM Kota Bandar Lampung (Sumber Dana PEN)	meter persegi	✓			2022	Rp 8.199.486.000
393	Instalasi Gardu Listrik	1 unit	✓			2022	Rp 33.000.000,00
394	Instalasi Listrik	1 unit	✓			2022	Rp 15.234.750,00
395	Penambahan Daya Listrik	watt	✓			2022	Rp 19.596.375,00

1.6. Aspek Strategi Organisasi

Pemerintah memegang peran sebagai penyelenggara negara yaitu menjadi penggerak perwujudan tujuan nasional tersebut. Dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah bertindak mewakili kepentingan seluruh lapisan masyarakat dimulai dari tingkat kelompok masyarakat, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten-Kota, Provinsi sampai Nasional dan tingkat global-internasional pembangunan antar negara dan bangsa. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung mempunyai peranan penting sebagai salah satunya adalah memajukan koperasi dan UMKM dengan melakukan pemberdayaan dan pengembangan pada UMKM di Kota Bandar Lampung yang telah tertuang dalam RENSTRA Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung.

Strategi yang ditempuh untuk mencapai Koperasi dan UMKM yang maju dan dapat meningkatkan perekonomian Kota Bandar Lampung antara lain:

1. Melakukan fungsi Koordinasi dengan OPD yang berkaitan dengan Usaha Mikro Kecil;
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia, baik itu sumber daya manusia pada pelaku usaha mikro serta sumber daya aparatur Dinas Koperasi dan UKM;
3. Pengembangan pasar dengan meningkatkan jaringan pemasaran maupun pameran-pameran di dalam daerah maupun luar daerah;
4. Pengembangan kemitraan antara Koperasi dan UKM dengan dunia usaha termasuk pihak-pihak perbankan;
5. Mendorong tumbuhnya wirausaha baru dengan pemberian insentif-insentif seperti kemudahan dalam perijinan dan kemudahan dalam pengurusan sertifikat halal;
6. Peningkatan dan penguatan kelembagaan koperasi.

1.7. Isu Strategis

Dapat dirumuskan beberapa isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung sebagai berikut :

Sektor Koperasi : Penguatan kelembagaan koperasi sebagai badan usaha yang mandiri dan profesional. Isu-isu strategisnya meliputi :

- a. Rebranding dan modernisasi koperasi:
Meningkatkan citra koperasi agar lebih diminati, terutama oleh generasi muda.
- b. Peningkatan tata kelola dan manajemen:
Mendorong penerapan tata kelola yang baik (Good Governance) untuk mencegah masalah dan melindungi anggota.
- c. Revisi Undang-Undang Perkoperasian:
Memperbarui regulasi agar sesuai dengan perkembangan zaman dan tantangan saat ini.
- d. Peningkatan partisipasi anggota:
Mengatasi rendahnya minat dan partisipasi anggota dalam kegiatan koperasi.
- e. Digitalisasi sistem informasi manajemen:
Memanfaatkan teknologi untuk efisiensi dan transparansi operasional koperasi.

Sektor UMKM : Pemberdayaan dan peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai penggerak ekonomi. Isu-isu strategisnya meliputi:

- a. Akses pasar :
Mendorong UMKM untuk *onboarding* ke ekosistem digital dan memperluas jangkauan pasar, baik domestik maupun global.
- b. Peningkatan akses pembiayaan:
Memfasilitasi akses permodalan yang lebih mudah dan terjangkau bagi pelaku UMKM.

- c. Peningkatan kapasitas SDM dan produktivitas:
Memberikan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kualitas produk, efisiensi produksi, dan keterampilan manajerial.
- d. Penyediaan data tunggal UMKM:
Membuat sistem pendataan yang akurat dan dinamis untuk memetakan kondisi dan kebutuhan UMKM secara tepat sasaran.
- e. Perluasan kemitraan strategis:
Membangun kolaborasi antara UMKM dengan usaha besar atau lembaga lainnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah Kota Bandar Lampung telah Menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang ataupun hambatan dan kendala yang mungkin timbul. Rencana strategis Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil, Menengah Kota Bandar Lampung merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.

2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi

Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 adalah : ***“Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Berbudaya, Nyaman, Unggul Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat”***.

Misi

Untuk mewujudkan visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 - 2026, dirumuskan 7 (tujuh) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan masyarakat;
3. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial;
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan Kesejahteraan Rakyat:
5. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya, dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang religious;
6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, beriwibawa, dan bertanggungjawab untuk mendukung investasi;
7. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan;

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandar Lampung berdasarkan tugas dan fungsi mengacu pada Misi Ke-4 Yaitu:

Misi ke 4 : Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan Kesejahteraan Rakyat:

Yang kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dan indikator serta target jangka menengah dan tahunan Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana termuat didalam Rencana Strategis Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil, Menengah Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 secara terperinci sebagai berikut :

Tabel 2.1
Matriks Keterkaitan Antara Tujuan dan Sasaran
Renstra Tahun 2021-2026
Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM dalam pertumbuhan Ekonomi		Meningkatnya koperasi berkualitas
				Pertumbuhan Produktivitas UMKM
			Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi yang professional dan Akuntabel	Persentase Koperasi Sehat dan cukup sehat
			Meningkatnya Wirausaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Persentase UMKM yang meningkat labanya
			Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh inspektorat Kota (Nilai SAKIP OPD)

Pada Tahun 2025 Pemerintah kota Bandar Lampung telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 maka Dinas koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung melakukan penyesuaian tujuan, sasaran, indikator kinerja yang telah tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029. Penyusunan tujuan, sasaran, indikator kinerja telah mengacu pada RPJMD kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029. Tujuan, sasaran, indikator kinerja yang tertuang pada Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Matriks Keterkaitan Antara Tujuan dan Sasaran
Renstra Tahun 2025-2029 Dinas Koperasi dan UKM

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya kontribusi UMKM dalam Perekonomian		Rasio Pertumbuhan Wirausaha baru Berskala Mikro
			Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi yang berkualitas, professional dan Akuntabel	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas
			Meningkatnya Wirausaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Persentase UMKM yang meningkat labanya
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung	Hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, maka dirumuskan tujuan dan sasaran Renstra, indikator kinerja utama Dinas Koperasi dan usaha Kecil, Menengah Kota Bandar Lampung sebagai berikut:

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk menunjang keberhasilan sasaran RPJMD maka perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target kinerja dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 dan tujuan, sasaran, indikator kinerja dalam Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun (%)					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM dalam pertumbuhan Ekonomi		Meningkatnya koperasi yang berkualitas	1,10	1,50	2,10	2,50	3,10	3,50
			Peningkatan Produktivitas UMKM	2,30	3,50	4,30	5,50	6,30	6,70
		Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi yang profesional dan Akuntabel	Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat	16,96	18,11	19,12	20,34	21,53	21,53
		Meningkatnya Wirausaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Persentase UMKM yang meningkat labanya	26,30	31,50	34,20	39,49	44,70	44,70
		Meningkatnya penyelenggaraan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan menengah	Hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai Sakip OPD)	80,50	80,70	80,90	81,10	81,30	81,50

Dokumen Renstra 2021-2026 Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung

Tabel 2.4.
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun (%)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM dalam pertumbuhan Ekonomi		Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru Berskala Mikro	35,83	37,60	39,37	40,98	42,37	43,53
		Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi yang berkualitas, profesional dan Akuntabel	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	13,44	18,86	22,40	25,91	28,47	31,00
		Meningkatnya Wirausaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Persentase UMKM yang meningkat labanya	67,32	72,96	76,93	79,89	82,18	84,00
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Koperasi, Usaha Kecil dan menengah	Hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Dinas koperasi dan UKM (Nilai Sakip OPD)	77,85	78,25	78,50	79,10	79,40	80,10

Dokumen Renstra 2025-2029 Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung

2.2. Indikator Kinerja utama (IKU) Perangkat Daerah

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.5
Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA/PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi yang professional dan Akuntabel	Persentase koperasi sehat dan cukup sehat	%	Kategori Penilaian Koperasi : Sehat : 80,01-100 Cukup Sehat = 66,01-80,00 Dalam Pengawasan = 51,01-66,00 Dalam Pengawasan Khusus = 0-51	Jumlah koperasi sehat dan cukup sehat / jumlah seluruh koperasi X 100%	Data Keragaan koperasi
2	Meningkatnya Wirausaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Persentase UMKM yang yang meningkat labanya	%	Proporsi jumlah UMKM secara keseluruhan dalam suatu populasi yang labanya meningkat dalam setahun terakhir	Jumlah UMKM yang meningkat labanya / Jumlah UMKM dalam pengawasan x 100%	Database UMKM
3	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh inspektorat Kota (Nilai SAKIP OPD)	Nilai	Penilaian Lakip oleh Inspektorat	Hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai Sakip OPD)	Hasil Penilaian Inspektorat

2.3. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, namun demi terwujudnya RKT yang benar-benar realistis, target dapat dicapai dan kinerja yang dihasilkan memiliki outcome terhadap terwujudnya sasaran pembangunan daerah, maka RKT 2026 yang sebelumnya ditetapkan berdasarkan Renstra pada tahun berjalan dilakukan reviu/penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi dan realisasi kinerja tahun sebelumnya yang tertuang dalam LKjIP tahun 2025 serta dokumen hasil penyusunan pohon kinerja. Berikut Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 :

Tabel 2.6
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi yang profesional dan Akuntabel	Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat	21,53%	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi aktif	47,85%
				Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi	37,50%
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian KSP/USP Koperasi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	80 Unit Usaha
				Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pertumbuhan jumlah anggota koperasi	0,50%
				Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten Kota	Persentase kopersi yang mengikuti pelatihan	60,00%
				Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang memahami perkoperasian	50 Orang

				Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pertumbuhan volume usaha koperasi	5,38%
					Persentase fasilitasi penerbitana Sertifikat Nomor induk Koperasi	29,54%
				Kegiatan Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi	1,26%
				Sub Kegiatan Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang keanggotaannya Daerah/Kab Kota	Jumlah koperasi yang di fasilitasi kemitraannya	126 Unit Usaha
				Sub Kegiatan Pemberdayaan koperasi dengan keanggotaan Daerah kabupaten/kota	Koperasi dengan keanggotaan daerah kabupaten/kota	50 Unit Usaha
2	Meningkatnya Wirausaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Persentase UMKM yang meningkat labanya	34,20%	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	26,80%
					Persentase UKM Non BPR UKM Aktif	42,75%
					Persentase BPR/LKM aktif	100%
				Kegiatan Pemberdayaan Kegiatan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikat induk	4,20%
					Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	7,80%
				Sub Kegiatan pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	100 unit usaha
				Sub Kegiatan pemberdayaan kelembagaan potensi pengembangan usaha mikro	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan Pendampingan terhadap usaha mikro	500 unit usaha
				Program Pengembangan UKM	Persentase usaha mikro dan kecil	68,50%
					Pertumbuhan produktivitas UMKM	8,20%
				Kegiatan Pengembangan Usaha mlkro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha kecil	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	2,70%
				Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	Jumlah unit usaha UMKM yang mendapatkan fasilitas produksi dan pengolahanpemasaran sumber aya manusia serta desain dan teknologi	30 unit usaha

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Dinas Koperasi dan usaha Kecil, Menengah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Pada tanggal 12 bulan Januari tahun 2025 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Koperasi dan usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung tidak mengalami perubahan dan tidak ada perbedaan antara target kinerja pada Rencana Kinerja dengan yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja sebagaimana terlampir di tabel berikut :

Tabel 2.7.
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Dokumen Renstra 2021-2025 Dinas Koperasi dan UKM				
1	Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi yang professional dan Akuntabel	Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat	%	21,53
2	Meningkatnya Wirausaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Persentase UMKM yang meningkat labanya	%	44,70
3	Meningkatnya penyelenggaraan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan usaha menengah	Hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota (Nilai SAKIP OPD)	Nilai	81,30
Dokumen Renstra 2025-2029 Dinas Koperasi dan UKM				
1	Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi yang berkualitas, professional dan Akuntabel	Persentase meningkatnya koperasi berkualitas	%	13,44
2	Meningkatnya Wirausaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Persentase UMKM yang meningkat labanya	%	61,74
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan UKM	Hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung	Nilai	77,85

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung :

Tabel 2.8.
Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kota Bandar Lampung Sebelum dan Setelah Perubahan Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Anggaran	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi aktif	47,85%	47,85%	75.052.192	75.052.192
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dama 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi	37,50%	37,50%	75.052.192	75.052.192
	<i>Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang dinilai kesehatannya	80 Unit Usaha	80 Unit Usaha	75.052.192	75.052.192
2	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pertumbuhan Jumlah anggota Koperasi	0,50%	0,50%	40.481.016	40.481.016
	<i>Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian	60% 0,13%	60% 0,13%	40.481.016	40.481.016
	<i>Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi</i>	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	50 Orang	50 Orang	40.481.016	40.481.016
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pertumbuhan volume usaha koperasi	5,38%	5,38%	225.364.245	1.100.364.245
		Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)	29,54%	29,54%		
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi	1,26%	1,26%	225.364.245	1.100.364.245

	Fasilitasi Kemitraan Koperasi Yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang Difasilitasi Kemitrannya	-	126 Unit usaha		1.000.000.000
	<i>Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Koperasi dengan keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	50 Unit usaha	50 Unit usaha	225.364.245	100.364.245
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	26,80%	26,80%	3.710.000.000	3.572.579.906
		Persentase UKM Non BPR LKM Aktif	42,75%	42,75%		
		Persentase BPR/LKM Aktif	100%	100%		
5	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikat produk	4,20%	4,20%	3.710.000.000	3.572.579.906
		Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan	7,80%	7,80%		
	<i>Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro</i>	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	3.000.000.000	3.000.000.000
	<i>Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro</i>	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	500 Unit Usaha	300 Unit usaha	710.000.000	572.579.906
6	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro dan kecil	68,50%	68,50%	659.000.000	522.748.746
		Pertumbuhan produktivitas UMKM	8,20%	8,20%		
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	2,70%	2,70%	659.000.000	522.748.746
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta	30 Unit usaha		659.000.000	522.748.746

		Desain dan teknologi				
7	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabuten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan menengah	98%	30 Unit usaha	3.886.493.777	4.006.493.777
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	100%	98%	84.023.224	84.023.224
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	100%	84.023.224	84.023.224
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	100%	100%	2.981.533.230	2.997.073.230
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang	26 Orang	2.928.391.230	2.928.391.230
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	53.142.000	68.682.000
	Administrasi Kepegawaian Daaerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	15.000.000	15.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang	15.000.000	15.000.000

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	98%	98%	185.680.863	170.140.863
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	27.231.317	27.231.317
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.050.527	5.050.527
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	21.000.000	21.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	26.999.019	26.999.019
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	5.400.000	5.400.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	84.460.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	98%	98%	69.413.612	69.413.612
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	22 Unit	22 Unit	24.112.092	24.112.092
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4 Unit	4 Unit	45.301.520	45.301.520
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	98%	98%	483.592.848	603.592.848
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	85.192.848	85.192.848

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	398.400.000	518.400.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	98%	98%	67.250.000	67.250.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	40.170.000	40.170.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan perizinannya	5 Unit	5 Unit	19.250.000	19.250.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	11 Unit	7.830.000	7.830.000
JUMLAH					8.596.391.230	9.317.719.882

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKIP TAHUN SEBELUMNYA

1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Nilai Lakip untuk Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung diperoleh dari laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja oleh Inspektorat Daerah Kota Bandar Lampung Nomor : 700.1.2.1.19.2.KH.II.02.2025 tanggal 3 Maret 2025 tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung

Tabel 3.1
Tabel nilai hasil evaluasi LKIP
Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai 2020	Nilai 2021	Nilai 2022	Nilai 2023	Nilai 2024
1	Perencanaan kinerja	30%	27,31%	24,30%	24,30%	24,60%	22,20%
2	Pengukuran kinerja	25%	19,06%	21,00%	21,00%	21,90%	21%
3	Pelaporan kinerja	15%	10,88%	10,50%	12,30%	12,30%	12%
4	Evaluasi kinerja	10%	8,43%	17,50%	18,75%	18,75%	19,25%
5	Capaian kinerja	20%	14,69%	-	-		-
	Nilai hasil evaluasi	100%	80,37%	73,31%	76,35%	77,55%	74,45%
	Tingkat akuntabilitas kinerja		A	B+	B+	BB	BB

2. Tindak lanjut atas hasil Evaluasi Inspektorat Kota Bontang Terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP

Tindak lanjut atas hasil evaluasi Inspektorat terhadap LKIP Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dapat diuraikan melalui tabel berikut:

Tabel 3.2
Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Inspektorat
Kota Bandar Lampung Tahun 2024

No.	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	RENCANA AKSI
1.	- Membuat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja	- Melaksanakan perbaikan dokumen berupa mekanisme dan pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.	- Rekomendasi telah ditindaklanjuti.
2.	- Menyusun dokumen cascading dengan mencantumkan kinerja masing-masing kegiatan dan subkegiatan -	- Melaksanakan perbaikan cascading berupa kinerja disetiap kegiatan dan subkegiatan	- Rekomendasi telah ditindaklanjuti.
3	- Melakukan pengukuran kinerja dalam pengumpulan data dan pengukuran capaian kinerja dengan memanfaatkan teknologi informasi (Aplikasi)	- Melaksanakan pengukuran kinerja dengan memanfaatkan teknologi informasi (Aplikasi)	- Rekomendasi telah ditindaklanjuti
4	- Memanfaatkan hasil evaluasi ekuntabilitas kinerja internal dengan mengoptimalkan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sehingga timbul percepatan pencapaian kinerja	- Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal akan ditindaklanjuti untuk perbaikan kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung.	- Rekomendasi telah ditindaklanjuti.

3.2. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Alat untuk melaporkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), yang merupakan salah satu komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LKIP disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan data pendukung untuk melihat seberapa besar sasaran kinerja yang ditargetkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung Tahun 2025 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Perumusan indikator kinerja sasaran lebih difokuskan pada indikator kinerja Strategis dan Tahunan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dengan nilai capaian Kinerja Sasaran dikelompokkan dalam skala pengukur ordinal sebagai berikut:

85 % s/d 100 % : Sangat Baik

70 % s/d <85 % : Baik

55 % s/d <70 % : Cukup Baik

<55 % : Tidak Baik

3.2.1. Analisis Capaian Kinerja

Hasil pengukuran atas capaian Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3.
Capaian Kinerja Dinas Koperasi dan UKMTahun 2025
Renstra 2021-2026 Dinas Koperasi dan UKM,

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Skala Nilai
Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi yang professional dan Akuntabel	Persentase koperasi sehat dan cukup sehat	21,53%	15,51%	72,07%	Baik
Meningkatnya Wirausaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Persentase UMKM yang meningkat labanya	44,70%	64,50%	144,29%	Sangat Baik
Meningkatnya penyelenggaraan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan usaha menengah	Hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota (Nilai SAKIP OPD)	81,30%	-	-	-
Rata – Rata Capaian			40,00%	108,18%	

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian 3 (tiga) indikator sasaran Dinas Koperasi Dan Usaha Menengah Kota Bandar Lampung rata rata mencapai 108,18% dan masuk dalam kategori sangat baik dengan demikian maka secara umum Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Bandar Lampung telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang koperasi, usaha kecil dan menengah secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis umum Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Jember tahun 2021 -2026 Selanjutnya untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.4.
Capaian Kinerja Dinas Koperasi dan UKMTahun 2025
Renstra 2025-2029 Dinas Koperasi dan UKM

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Skala Nilai
Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi yang berkualitas, professional dan Akuntabel	Persentase meningkatnya koperasi berkualitas	13,44%	9,48%	70,56%	Baik
Meningkatnya Wirausaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Persentase UMKM yang meningkat labanya	61,74%	64,50%	104,47%	Sangat Baik
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan UKM	Hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung	77,85	-	-	-
Rata – Rata Capaian			36,99%	87,51%	

**ANALISIS UNTUK CAPAIAN INDIKATOR KINERJA RENSTRA 2025-2029
SEBAGAI BERIKUT:**

- Indikator Persentase Meningkatnya koperasi yang berkualitas

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Skala Nilai
Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi yang berkualitas, professional dan Akuntabel	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	13,44%	9,48%	70,56%	Baik

Indikator Persentase Koperasi Berkualitas menunjukkan predikat Baik yaitu 70,56%. Hal ini karena meningkatnya peran serta koperasi dalam meningkatkan kualitas koperasi baik kelembagaan dan Sumber Daya Manusia. Dinas Koperasi Dan UKM Kota Bandar Lampung terus mendorong koperasi di wilayah Kota Bandar Lampung untuk tumbuh sebagai penyanggah ekonomi Masyarakat dan memberikan perhatian penuh kepada koperasi untuk tetap terus berdiri sendiri.

**Capaian Indikator “Persentase Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas”
Tahun 2025 (dibandingkan tahun sebelumnya)**

Sasaran	Indikator sasaran	Capaian Tahun		Capaian Tahun 2025			Capaian Tahun 2025 terhadap capaian tahun 2024
		2023	2024	Target	Realisasi	Capaian	
Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi yang berkualitas, professional dan Akuntabel	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	4,40%	5,54%	13,44%	9,48%	70,56%	171,11%

Perbandingan Capaian Indikator "Persentase Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas" tahun ini Dengan target akhir periode renstra

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Target akhir Renstra (2030)	capaian 2025 terhadap akhir renstra Tahun 2030 (%)
		Target	Realisasi	Capaian		
Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi yang berkualitas, professional dan Akuntabel	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	13,44%	9,48%	70,56%	31,00%	30,58%

Adapun kendala dan permasalahan yang dihadapi adalah :

- a. Pengurus dan Pengawas mayoritas tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menjalankan koperasi dengan baik.
- b. Di era milenial saat ini dirasakan oleh gerakan koperasi bahwa peran pemerintah dalam melayani dan mengawasi kelembagaan koperasi masih berbasis secara konvensional. Sehingga untuk mengatasi hal ini dapat dilakukan digitalisasi data, dengan cara meng scan data yang ada di dinas koperasi. Merubah data berbasis kertas, menjadi data digital. Sehingga ketika membutuhkan data, akan mudah dan cepat dalam pencarian.
- c. Banyak koperasi yang mengajukan perijinan, namun belum memenuhi komitmen sebagai persyaratan terbitnya ijin
- d. Dengan terbatasnya anggaran banyak koperasi yang belum mengikuti Diklat/Bimtek

Peran serta Dinas Koperasi Dan UKM dalam menjalankan tugas dan fungsinya di tahun 2025 dalam pengembangan koperasi antara lain - Meningkatkan kualitas koperasi dalam pengelolaan koperasi baik secara kelembagaan maupun sumber daya manusia (SDM) melalui bimbingan teknis bagi pengurus dan pengawas koperasi tentang perkoperasian dan uji kompetensi bagi pengurus.

- **Indikator Persentase UMKM yang meningkat labanya**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Skala Nilai
Meningkatnya Wirausaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Persentase UMKM yang meningkat labanya	61,74%	64,50%	104,47%	Sangat Baik

Indikator Persentase UMKM yang meningkat labanya menunjukkan predikat Baik yaitu 104,47% hal ini dikarenakan secara umum Dinas Koperasi Dan UKM Kota Bandar Lampung telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang koperasi, usaha kecil dan menengah secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis umum Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung tahun 2025 -2029.

**Capaian Indikator Persentase UMKM yang meningkat labanya
Tahun 2025 (dibandingkan tahun sebelumnya)**

Sasaran	Indikator sasaran	Capaian Tahun		Capaian Tahun 2025			Capaian Tahun 2025 terhadap capaian tahun 2024
		2023	2024	Target	Realisasi	Capaian	
Meningkatnya Wirausaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Persentase UMKM yang meningkat labanya	34,20%	60,55%	61,74%	64,50%	104,47%	106,52%

Capaian indikator persentase UMKM yang meningkat labanya Tahun 2025 dibandingkan capaian tahun 2024 mencapai kemajuan sebesar 106,52%

Perbandingan Capaian Indikator Persentase UMKM yang meningkat labanya tahun ini Dengan target akhir periode renstra

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Target akhir Renstra (2030)	Realisasi s/d 2025 terhadap akhir renstra Tahun 2030 (%)
		Target	Realisasi	Capaian		
Meningkatnya Wirausaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Persentase UMKM yang meningkat labanya	44,70%	64,50%	144,29%	84,00%	76,78%

Capaian tahun 2025 dibandingkan terhadap target akhir periode renstra mencapai 76,78%.

**ANALISIS UNTUK CAPAIAN KINERJA INDIKATOR RENSTRA 2021-2026
SEBAGAI BERIKUT:**

TUJUAN

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan- perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yaitu Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM dalam pertumbuhan Ekonomi dan indikator tujuan tersebut adalah:

1. Meningkatnya koperasi yang berkualitas
2. Pertumbuhan produktivitas UMKM

Tujuan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung sebagai berikut :

Tujuan	Indikator Kinerja	satuan	Realisasi			Tahun N (2025)			Target Akhir Renstra
			n-3 (2022)	n-2 (2023)	n-1 (2024)	Target	Realisasi	%	
Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM dalam pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	%	3,65	4,40	5,54	3,34	9,48	283,83	3,34
	Pertumbuhan produktivitas UMKM	%	4,02	6,97	6,97	7,50	25,11	334,8	10,45

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Indikator tujuan pada Renstra 2021-2025 telah menunjukkan capaian kinerja yang memuaskan pada capaian indikator kinerja tujuan meningkatnya koperasi yang berkualitas pada tahun 2025 target 3,34% dengan realisasi 9,48% baseline data jumlah koperasi berkualitas sebanyak 55 unit koperasi dan Pertumbuhan Produktivitas UMKM target 7,50% realisasi 25,11% dengan baseline data jumlah produktivitas UMKM 55 unit usaha. Rencana Startegis (Renstra) Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung memiliki 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) indikator kinerja pada tujuan. Indikator kinerja pada tujuan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas

Indikator “meningkatnya koperasi yang berkualitas” berarti adanya peningkatan jumlah koperasi yang memenuhi standar pengelolaan, kinerja usaha, dan manfaat bagi anggota, ditandai dengan terlaksananya Rapat Anggota Tahunan (RAT) rutin, pertumbuhan omzet dan aset, jumlah anggota yang bertambah, serta laporan keuangan sehat, menunjukkan koperasi tersebut menerapkan prinsip-prinsip koperasi dengan baik dan mampu menyejahterakan anggotanya secara profesional.

Rumus Perhitungan indikator “Meningkatnya koperasi yang berkualitas” adalah sebagai berikut :

$$\text{Jumlah Koperasi Meningkat Kualitas} / \text{Jumlah Seluruh Koperasi} * 100\%$$

Keterangan:

- + Jumlah Koperasi Meningkat Kualitas :
Jumlah koperasi yang mengalami peningkatan kualitas berdasarkan hasil RAT (Rapat Anggota Tahunan), volume usaha, dan aset.
- + Jumlah Seluruh Koperasi :
Total keseluruhan koperasi yang terdaftar dan aktif dalam wilayah yang diukur.

2. Pertumbuhan Produktivitas UMKM

Indikator “Pertumbuhan Produktivitas UMKM” berarti peningkatan produktivitas menjadi suatu hal yang penting bagi pelaku usaha UMKM. Selain dapat meningkatkan produktivitas, pengelolaan kegiatan usaha yang secara optimal dapat berdampak pada peningkatan Pendapatan bagi pelaku UMKM. Usaha mikro mempunyai perputaran transaksi yang cepat, menggunakan produksi domestik dan bersentuhan dengan kebutuhan primer masyarakat. Sehingga sektor UMKM sangat potensial untuk dikembangkan dan didorong pertumbuhannya. Oleh karena itu, UMKM juga menjadi fokus pembangunan pemerintah agar dapat terus berkontribusi besar untuk pembangunan daerah maupun nasional.

Rumus Perhitungan indikator “Pertumbuhan Produktivitas UMKM” adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah UMKM berproduktifitas tahun ini dikurangi Jumlah UMKM berproduktivitas tahun lalu}}{\text{Jumlah UMKM berproduktivitas tahun lalu}} \times 100\%$$

Keterangan:

- ✚ Jumlah UMKM Berproduktivitas :
Jumlah UMKM yang melaksanakan kegiatan usaha mengacu pada proses di mana sebuah usaha berusaha meningkatkan kualitas produk dan usaha, meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional, mengembangkan strategi pemasaran yang lebih baik, membangun branding yang kuat, memenuhi standarisasi produk dan meningkatkan kemitraan serta pangsa pasar.

SASARAN

Sasaran 1__“MENINGKATNYA KINERJA KELEMBAGAAN DAN USAHA KOPERASI YANG PROFESSIONAL DAN AKUNTABEL” memiliki 1 (satu) indikator yaitu :

Indikator Kinerja “ **Persentase Koperasi Sehat dan cukup sehat**”

Adapun formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut :

$$“(Jumlah koperasi sehat / Seluruh jumlah koperasi) \times 100\%”$$

Capaian Indikator Kinerja
Persentase koperasi sehat dan cukup sehat Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Skala Nilai
Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi yang professional dan Akuntabel.	Persentase koperasi sehat dan cukup sehat	21,53%	15,51%	72,07%	Baik

Analisis untuk capaian indikator diatas adalah sebagai berikut:

Tingkat capaian Realisasi untuk indikator Persentase koperasi sehat dan cukup sehat Koperasi telah melampaui target yang telah ditetapkan dari target 21,53% tercapai 15,51% dengan capaian kinerja sebesar 72,07% dengan base line data pada Tahun 2025 koperasi sehat dan cukup sehat sebanyak 90 unit koperasi dengan total seluruh koperasi sebanyak 580 unit koperasi. Sedangkan pada Tahun 2024 dari total jumlah koperasi yang ada sebanyak 415 unit koperasi dan jumlah koperasi sehat dan cukup sehat sebanyak 94 unit koperasi. Pada Tahun 2025 jumlah seluruh koperasi sebanyak 580 unit koperasi sedangkan pada Tahun 2024 terdapat jumlah koperasi sebanyak 415 unit koperasi sehingga pada Tahun 2025 ada kenaikan jumlah koperasi sebanyak 165 unit koperasi, penambahan koperasi baru ini terdapat dari terbentuknya koperasi merah putih sebanyak 126 koperasi merah putih yang tersebar di seluruh kelurahan di Kota Bandar Lampung.

Pada sasaran pertama Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi yang professional dan Akuntabel dengan indikator Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat dimana tahun ini tercapai 72,07%. Hal ini karena peran serta Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung untuk meningkatkan pengawasan koperasi agar koperasi karena Pengawas koperasi merupakan bagian dari sistem pengendalian internal di dalam koperasi. Pengawas koperasi harus mampu menjalankan peran dan fungsinya dengan baik agar koperasi dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Koperasi yang sehat dapat dikenali dari pembukuan yang transparan, pertumbuhan anggota yang konsisten, peningkatan modal/asset serta pelaksanaan rapat anggota setiap tahunnya. Oleh karena itu perlu adanya pengelolaan Koperasi secara profesional untuk meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat sekaligus bagi keberlangsungan koperasi. Maka dari itu penting adanya pengelolaan yang professional dari sisi keuangan Koperasi, dan juga

pengelolaan dari sisi manajemen, agar kegiatan perkoperasian dapat terlaksana dengan baik, efektif dan efisien. Dalam situasi demikian, maka perlu adanya Penilaian Kesehatan Koperasi untuk mengetahui bagaimana kondisi Koperasi yang dapat dilihat dari sisi pengelolaan keuangan maupun manajemennya, Sehingga pada akhirnya Koperasi dapat dikategorikan dalam berbagai predikat, apakah Koperasi tergolong sehat atau tidak. Penilaian Kesehatan Koperasi meliputi: 1.) Tata Kelola (Prinsip Koperasi, Kelembagaan dan Manajemen. Pada Koperasi Syariah ditambah Prinsip Kepatuhan Syariah); 2.) Profil Resiko (Resiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Resiko-KPMR); 3.) Kinerja Keuangan (Evaluasi Kinerja Keuangan, Manajemen Keuangan dan Kesiambungan Keuangan); 4.) Permodalan (Kecukupan Permodalan dan Kecukupan Pengelolaan Permodalan)

Adapun parameter yang digunakan untuk menghitung persentase koperasi sehat dan cukup sehat adalah koperasi tersebut menjalankan usahanya dengan baik, yaitu dari sisi kelembagaan maupun manajerial sesuai dengan prinsip-prinsip perkoperasian yaitu dituangkan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT), yang selanjutnya digunakan dalam proses perolehan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Syarat untuk menjadi koperasi yang bisa dikatakan aktif dan sehat adalah koperasi yang selalu melakukan rapat anggota tahunan (RAT) setahun sekali. Dalam RAT dapat mengevaluasi bagaimana perkembangan dari neraca keuangan koperasi.

Adapun formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut :

$$\text{“(Jumlah koperasi sehat / Seluruh jumlah koperasi) x 100%”}$$

Berdasarkan data sebagaimana tersebut diatas, maka Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat tahun 2025 adalah :

- Data Jumlah koperasi sehat dan cukup sehat sebanyak 90 koperasi
- Data seluruh jumlah koperasi tahun ini sebanyak 580 koperasi.

Tabel 3.5.
Capaian Indikator Persentase koperasi sehat dan cukup sehat
Tahun 2025 (dibandingkan tahun sebelumnya)

Sasaran	Indikator sasaran	Capaian Tahun		Capaian Tahun 2025			Capaian Tahun 2025 terhadap capaian tahun 2024
		2023	2024	Target	Realisasi	Capaian	
Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi yang professional dan Akuntabel	Persentase koperasi sehat dan cukup sehat	20,88%	22,65%	21,53%	15,51%	72,07%	68,47%

Capaian indikator persentase koperasi sehat dan cukup sehat Tahun 2025 dibandingkan capaian tahun 2024 mencapai kemajuan sebesar 68,47% dengan realisasi capaian tahun 2024 sebesar 22,65% dan realisasi capaian tahun 2025 sebesar 15,51%.

Tabel 3.6.
Perbandingan Capaian Indikator Persentase koperasi sehat dan cukup
sehat tahun ini Dengan target akhir periode renstra

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Target akhir Renstra (2026)	Realisasi s/d 2025 terhadap akhir renstra Tahun 2026 (%)
		Target	Realisasi	Capaian		
Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi yang professional dan Akuntabel	Persentase koperasi sehat dan cukup sehat	21,53%	15,51%	72,07%	21,53%	72,03%

Capaian Koperasi sehat dan cukup sehat Tahun 2025 sebesar 72,07% dari realisasi koperasi sehat dan cukup sehat tahun 2025 sebesar 15,51% jika dibandingkan terhadap target akhir Renstra (21,53%) maka capaian akhir Restra sebesar 72,03%

Tabel 3.7
Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kota Bandar Lampung	Realisasi Provinsi Lampung	Realisasi Nasional
Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi yang professional dan Akuntabel	Persentase koperasi sehat dan cukup sehat	15,51%	-	-

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, diketahui bahwa Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung tidak ada yang terkait dengan standar nasional sehingga perbandingan realisasi kinerja tidak dapat dilaporkan dan disajikan lebih lanjut.

Capaian sasaran “Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi yang professional dan Akuntabel” ini didukung oleh beberapa program/kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Program ini difokuskan pada Peningkatan kualitas kelembagaan dan pengelolaan koperasi. Kegiatan-kegiatan didalamnya berupa pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi.

Upaya-upaya yang dilakukan melalui kegiatan tersebut diantaranya adalah :

- Penilaian kesehatan koperasi 80 koperasi
- Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha sebanyak 126 unit usaha Koperasi Merah Putih
- Koperasi yang telah diterbitkan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) sebanyak 105 Unit Koperasi

- Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya sebanyak 119 Unit Koperasi
- Koperasi yang diperiksa dan diawasi sebanyak 119 Unit Koperasi
- Penghargaan koperasi berprestasi 20 unit usaha koperasi.

2. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian,

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) koperasi sehingga pengelolaan koperasi dan UKM semakin berkualitas dan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas koperasi tersebut. Kegiatan didalamnya yaitu Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan Kompetensi SDM koperasi.

Upaya yang dilakukan melalui kegiatan tersebut diantaranya

- Koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebanyak 25 Unit Koperasi.
- Mengadakan pelatihan koperasi merah putih sebanyak 126 koperasi
- Anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian sebanyak 302 unit usaha koperasi

3. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.

Program ini difokuskan untuk pengembangan koperasi meliputi fasilitasi usaha koperasi, Peningkatan kualitas SDM serta pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha koperasi.

Kegiatan didalamnya yaitu Pemberdayaan Peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi.

Upaya yang dilakukan melalui kegiatan tersebut :

- a. (Temu bisnis & pelatihan SDM Koperasi Merah Putih, bantuan Modal Usaha untuk UKM penerima bantuan sepeda gerobak, Monitoring 126 Koperasi Kelurahan Merah Putih, terselenggaranya bazar& Pameran UKM bersama lembaga vertical, Pemberian spanduk 126

- kelurahan Koperasi Merah Putih sesuai wilayah; souvenir; buku panduan tata laksana Koperasi Merah Putih)
- b. Koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan sebanyak 2 (dua) Unit Koperasi
 - c. Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran sebanyak 6 (enam) unit koperasi
 - d. Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan sebanyak 2 (dua) unit koperasi.

Permasalahan yang menjadi hambatan/kendala adalah :

- a. Masih kurangnya ketrampilan SDM pengurus mengenai Ekonomi akuntansi dan manajemen resiko
- b. Masih Kurang transparan neraca keuangan karena harus balace
- c. Masih banyaknya koperasi yang tidak memiliki sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)
- d. Masih banyaknya koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan tidak tepat waktu
- e. Kurang memahami koperasi tentang pentingnya penilaian Kesehatan koperasi
- f. Masih banyaknya koperasi yang tidak aktif
- g. Masih rendahnya kesadaran Pengurus Koperasi terhadap kewajiban memiliki izin serta rendahnya pemahaman dan ketrampilan pengurus terhadap proses perizinan simpan pinjam koperasi
- h. Masih rendahnya tingkat kepatuhan Koperasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i. Masih rendahnya kualitas, produktifitas dan pemasaran produk koperasi

Solusi dalam pemecahan masalah :

- a. Pembinaan dan pendampingan yang maksimal dengan segala keterbatasannya baik dari sisi jumlah pegawai dan anggaran.
- a. Meningkatkan ketrampilan pengurus melalui pelatihan perkoperasian dan sosialisasi mulai dari aspek keuangan, permodalan, SDM dan Kelembagaan

- b. Melakukan pengawasan dan pendampingan kepada koperasi
- c. Mengadakan Sosialisasi tentang penilaian Kesehatan
- d. Melakukan pendampingan dan konsultasi kepada koperasi mengenai laporan keuangan
- e. Melakukan revitalisasi koperasi
- f. Peningkatan potensi usaha koperasi melalui pemetaan potensi usaha koperasi, pengembangan tata kelola dan manajemen usaha koperasi
- g. Meningkatkan produktifitas, manajemen usaha, permodalan, pembiayaan anggota dan SDM pengelola dan pembina Koperasi

Data koperasi berkualitas dan capaian koperasi sehat dan cukup sehat dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

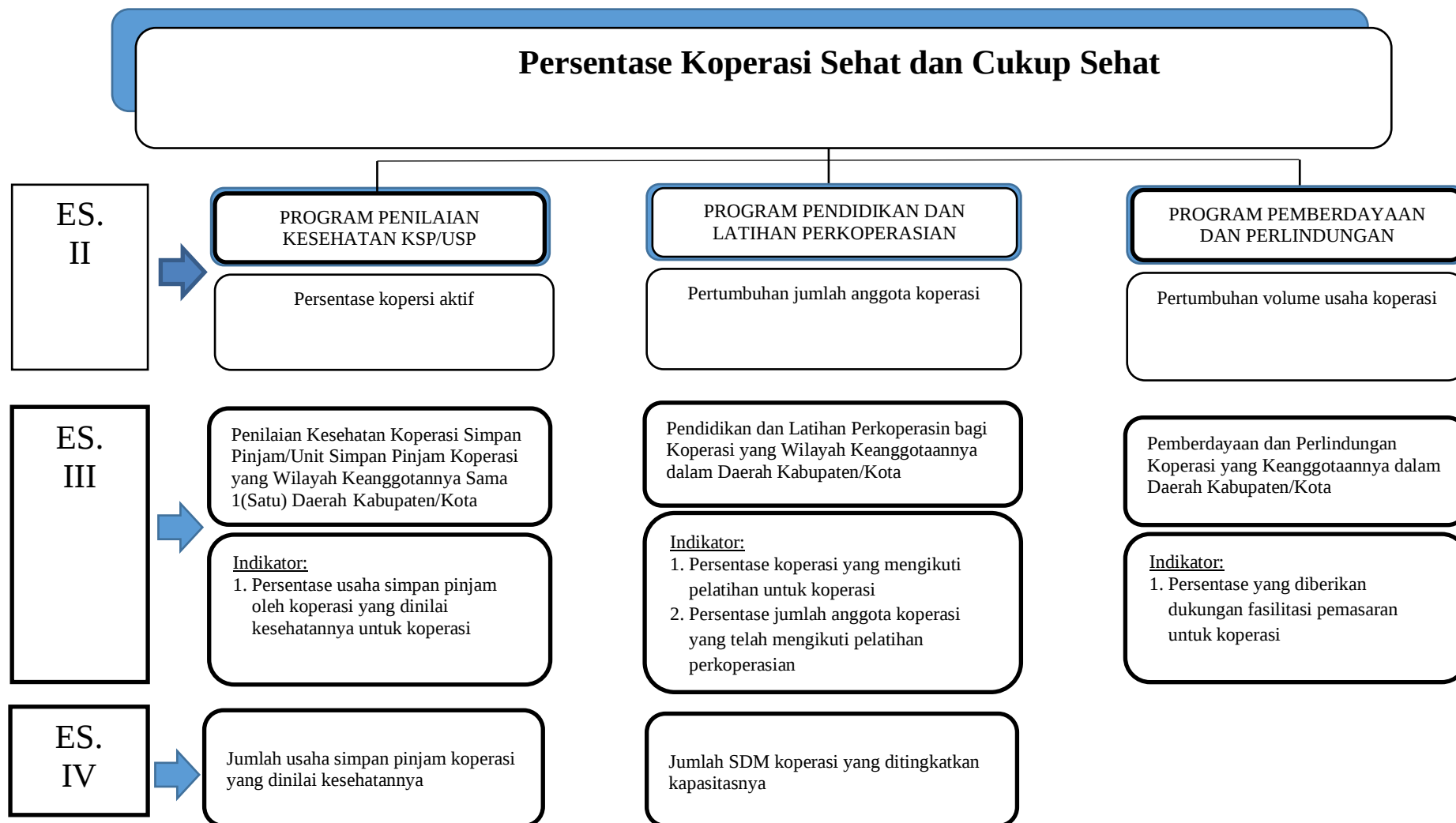
Tabel 3.8
Data Koperasi Berkualitas

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Jumlah
1	Koperasi yang telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) – (Online Data System/ODS)	Koperasi	119
2	Penilaian Kesehatan	Koperasi	119
4	Koperasi Yang diperiksa dan diawasi	Koperasi	119
5	Koperasi yang diterbitkan NIK	Koperasi	105
6	Koperasi Baru	Koperasi	165
7	Koperasi Berprestasi	Koperasi	20
8	Koperasi Aktif	Koperasi	316
8	Koperasi Sehat	Koperasi	55

Tabel 3.9.
Capaian Koperasi Sehat dan Cukup Sehat Tahun 2022 /d 2024

Tahun	Perbandingan		
	Jumlah Koperasi	Koperasi Aktif	Koperasi Sehat dan Cukup Sehat
2022	393	146	74
2023	409	160	85
2024	415	167	94
2025	580	316	90

Gambar 1.2. Cascading program/kegiatan dalam upaya mencapai target Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat



Sasaran 2 “MENINGKATNYA WIRAUSAHA UMKM YANG TANGGUH DAN MANDIRI” memiliki 1 (satu) indikator yaitu :

Indikator sasaran “ **Persentase UMKM yang Meningkatkan Labanya**”

Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025
Persentase UMKM yang meningkatkan labanya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Skala Nilai
Meningkatnya Wirausaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Persentase UMKM yang meningkat labanya	44,70%	64,50%	144,29%	Sangat Baik

Analisis untuk capaian indikator diatas adalah sebagai berikut:

Tingkat capaian Realisasi untuk indikator Persentase UMKM yang meningkat labanya telah melampaui target yang telah ditetapkan dari target 44,70% tercapai 64,50% dengan capaian kinerja sebesar 144,29% dengan base line data pada Tahun 2025 jumlah UMKM yang meningkat labanya sebanyak 1.225 UMKM sedangkan pada tahun 2024 jumlah UMKM yang meningkat labanya sebanyak 1.115 UMKM sehingga terdapat kenaikan UMKM yang meningkat labanya sebanyak 110 unit usaha dengan jumlah UMKM dalam pengawasan sebanyak 1.899 Unit Usaha.

Pencapaian sasaran “Meningkatnya Wirausaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri” dengan indikator “Persentase UMKM yang meningkat labanya didukung dengan diberikan fasilitasi bagi pelaku UMKM antara lain:

- Bantuan Permodalan baik melalui KUR, Hibah maupun Subsidi Bunga 0% yang bekerjasama dengan BRK Waway dan Bank Syariah,
- Penyaluran Pinjaman Kredit Ekonomi Kerakyatan Pemerintah Kota Bandar Lampung bekerjasama dengan Bank Waway yang diperuntukan bagi UKM produktif.

- c. Pendampingan pembuatan perizinan NIB, Sertifikat halal, P-IRT, HAKI, pendampingan pemasaran produk UKM ke toko oleh-oleh, dan pendampingan program EKOR
- d. Meningkatkan pengetahuan SDM pelaku UKM pemula dengan memberikan pelatihan peningkatan SDM penggiat UKM
- e. Pendampingan pemasaran Produk UKM ke toko oleh-oleh, swalayan, toserba dan di ikutsertakan ke Bazar/Bandar Lampung Expo.
- f. Pendampingan desain dan kemasan prduk UKM yang terdiri dari kemasan pouch, kotak, stiker, dan lain lain di Unit Layanan Kemasan Pemerintah Kota Bandar Lampung
- g. Peningkatan sarana dan prasarana Unit Layanan Kemasan Pemerintah Kota Bandar Lampung
- h. Mengikutsertakan pelaku UKM dalam kegiatan promosi UMKM dalam daerah dan luar daerah.
- i. Peran serta pemerintah Kota Bandar Lampung dalam membantu perkembangan UMKM di Kota Bandar Lampung dengan menyediakan tempat galery untuk UMKM antara lain : Masjid Al-furqon, Gedung UMKM, Taman wisata Kuliner Bung Karno, Car Free Day, Pameran Dalam Daerah dan Luar Daerah, dan Penyediaan Gedung Unit Layanan Kemasan.

Adapun parameter yang digunakan untuk menghitung persentase UMKM yang meningkat labanya adalah angka yang merepresentasikan jumlah spesifik UMKM yang, dalam periode waktu tertentu (misalnya, dari tahun lalu ke tahun ini), berhasil mencatat laba yang lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Jumlah Seluruh UMKM Ini adalah total UMKM yang menjadi dalam binaan/pengawasan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung

Adapun formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut :

“(Jumlah UMKM yang meningkat labanya / jumlah UMKM dalam pengawasan) x 100%”

Berdasarkan data sebagaimana tersebut diatas, maka Persentase UMKM yang meningkat labanya tahun 2025 adalah :

- Data Jumlah UMKM yang meningkat labanya sebanyak 1.225 unit usaha.
- Data seluruh UMKM dalam pengawasan sebanyak 1.899 unit usaha.

Tabel 3.10
Capaian Indikator Persentase UMKM yang meningkat labanya
Tahun 2025 (dibandingkan tahun sebelumnya)

Sasaran	Indikator sasaran	Capaian Tahun		Capaian Tahun 2025			Capaian Tahun 2025 terhadap capaian tahun 2024
		2023	2024	Target	Realisasi	Capaian	
Meningkatnya Wirausaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Persentase UMKM yang meningkat labanya	34,20%	60,55%	44,70%	64,50%	144,29%	106,25%

Capaian indikator persentase UMKM yang meningkat labanya Tahun 2025 dibandingkan capaian tahun 2024 mencapai kemajuan sebesar 106,25% dengan realisasi capaian tahun 2024 sebesar 60,55% dan realisasi capaian tahun 2025 sebesar 64,50%.

Jika dilihat dari perkembangan atas capaian kinerja yang dibandingkan dengan Tahun 2024, terdapat kenaikan capaian kinerja pada Tahun 2025 yang sangat baik. Beberapa dari capaian kinerja menunjukkan melebihi dari target yang ditetapkan. Pada Tahun 2025 peningkatan capaian kinerja ini dikarenakan bertambahnya anggaran yang mendukung pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sehingga dapat mendongkrak capaian kinerja yang ditetapkan.

Tabel 3.11
Perbandingan Capaian Indikator Persentase UMKM yang meningkat labanya tahun ini Dengan target akhir periode renstra

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Target akhir Renstra (2026)	Realisasi s/d 2025 terhadap akhir renstra Tahun 2026 (%)
		Target	Realisasi	Capaian		
Meningkatnya Wirausaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Persentase UMKM yang meningkat labanya	44,70%	64,50%	144,29%	44,70%	144,29%

Apabila capaian indikator persentase UMKM yang meningkat labanya tahun ini dibandingkan pada akhir renstra tercapai sebesar 144,29% dari target akhir renstra sebesar 44,70%. Tingkat kemajuan yang ditunjukkan oleh persentase UMKM yang meningkat labanya pada tahun ini 64,50% ini menunjukkan bahwa capaian telah melebihi target akhir Renstra dengan target 44,70%.

Tabel 3.12
Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kota Bandar Lampung	Realisasi Provinsi Lampung	Realisasi Nasional
Meningkatnya Wirausaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Persentase UMKM yang meningkat labanya	64,50	-	-

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, diketahui bahwa Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung tidak ada yang terkait dengan standar nasional sehingga perbandingan realisasi kinerja tidak dapat dilaporkan dan disajikan lebih lanjut.

Bahwa dalam sasaran “Meningkatnya Wirausaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri” didukung melalui kegiatan pembinaan pada 3 (tiga) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

1. sub kegiatan Pemberdayaan melalui kemitraan Usaha Mikro
 - a. Tersalurnya 100 (seratus) sepeda gerobak listrik kepada peaku UKM yang telah diusulkan oleh 20 Kecamatan Se-Kota Bandar Lampung
2. Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
 - a. Terfasilitasinya peningkatan sarana dan prasarana Unit Layanan Kemasan Pemerintah Kota Bandar Lampung
 - b. Membantu subsidi 166 desain dan kemasan prduk UKM yang terdiri dari kemasan pouch, kotak, stiker, dan lain lain dengan harga terjangkau di Unit Layanan Kemasan Pemerintah Kota Bandar Lampung
 - c. Pendampingan pembuatan perizinan bagi UKM antara lain :
 - Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) UKM sebanyak 210 UKM
 - Pembuatan Sertifikat Halal (bekerjasama dengan Kementerian Agama) 10 UKM
 - Usulan Perizinan Industri Rumah Tangga (P-IRT) ke Dinas Kesehatan sebanyak 10 UKM
 - Rekomendasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) sebanyak 26 UKM
 - d. Pendampingan pemasaran produk UKM ke toko oleh-oleh, swalayan sebanyak 15 UKM
 - e. Pelatihan Kewirausahaan dengan total 250 orang (126 Pengurus Koperasi Merah Putih dan 124 Pelaku UKM Pemula) peserta yang diselenggarakan pada hari Rabu, 6 Agustus 2025 digedung Semergou Kantor Pemerintah Kota Bandar Lampung.
 - f. Pelatihan Desain dan Kemasan produk UKM di Unit Layanan Kemasan Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan total peserta 50 Pelaku UKM yang diselenggarakan hari Rabu, tanggal 22 Oktober

2025 di gedung Unit Layanan Kemasan Pemerintah Kota Bandar Lampung

3. Sub kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, , Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
 - a. Terlaksananya Apeksi Untuk Negeri” yang diselenggarakan pada tanggal 8-10 Mei 2025 di Grand City Mall, Surabaya, Jawa Timur, Produk yang dibawa anatralain pakaian khas Lampung yang terdiri dari kain tapis lampung, baju sulam usus, peci, asesoris lampung, oleh-oleh khas lampung meliputi kopi, keripik dengan berbagi varian bentuk dan rasa, dan membawa 11 UKM dengan profit keuntungan UKM senilai Rp.280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah)
 - b. Terlaksananya promosi produk UKM di Pamerana Inacraft Youthpreneurs pada Tanggal 1-5 Oktober 2025 di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat Jakarta pada pameran ini membawa produk KM yang terdiri dari kain tapis, baju sulam usus, outer khas lampung, kain batik lampung berbagai asesoris seperti dompet, kalung dan bros. Pameran ini para UKM mendapatkan profit keuntungan senilai Rp.160.000.000 (serratus enam puluh juta rupiah)
 - c. Terlaksananya promosi UKM di Pameran Kriya Jemari yang diselenggarakan di Ballroom Graha Wangsa 20-22 November 2025, Bandar Lampung. Stand pameran disi oleh 5 penggiat UKM yang memamerkan produk unggulannya seperti kain tapis dan sulam usus, batik khas lampung serta outer khas lampng, total profit keuntungan senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah)

Permasalahan yang menjadi hambatan/kendala adalah :

- a. Masih Rendahnya Pemasaran Produk UMKM;
- b. Masih Belum Maksimalnya Pemanfaatan Teknologi oleh UMKM;
- c. Belum Maksimalnya Pembiayaan bagi UMKM;
- d. Masih Rendahnya Manajemen Pengelolaan UMKM
- e. Belum terdapatnya database UMKM berbasis aplikasi

- f. Kurangnya wadah, program pendampingan, dan pembinaan terstruktur yang disediakan untuk membantu usaha mikro tumbuh dan naik kelas
- g. Kurang kesadaran UMKM tentang pentingnya legalitas formal usaha terkait ijin edar seperti NIB, Sertifikat halal, P-IRT dan HAKI.
- h. Kemasan produk UMKM masih belum sesuai standart
- i. Lemahnya kemitraan UMKM
- j. Kurangnya SDM Aparatur yang melakukan verifikasi data-data UMKM termasuk mengelola pelaporan omset UMKM;
- k. Pelaku UMKM mayoritas belum memiliki legalitas usaha sehingga berdampak pada keterbatasan terhadap akses pembiayaan

Adapun Langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kegiatan melalui pelatihan-pelatihan dan inkubasi bisnis
- b. Memberikan Fasilitas Legalitas untuk standarisasi produk UMKM berupa NIB, PIRT, Sertifikat Halal dan HAKI.
- c. Membangun Kemitraan dengan perusahaan (retail) untuk membuka saluran pemasaran khususnya produk kemasan
- d. Fasilitas Pembukaan Gerai, dengan Digitalisasi Marketing, Pameran Produk dan Bazaar bagi pelaku UMKM.
- e. Optimalisasi akses pemasaran dengan memanfaatkan teknologi dan mendorong UMKM bertransformasi.
- f. Membangun Kerjasama dengan penggiat usaha

Jumlah UMKM yang telah difasilitasi dan jumlah UMKM yang meningkat labanya dapat dilihat pada table dibawah ini :

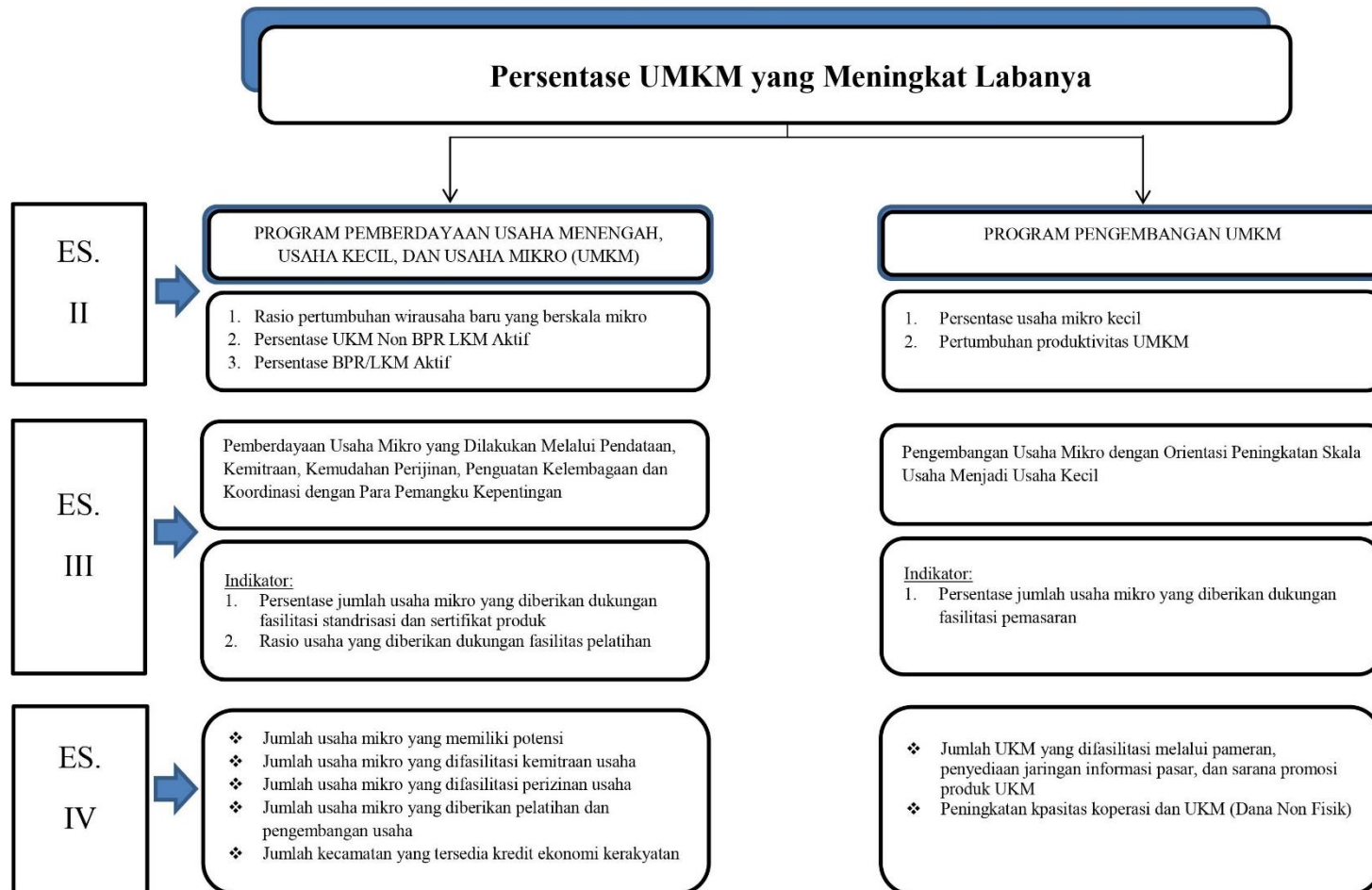
Tabel 3.13
Jumlah UMKM yang difasilitasi

No	Uraian Kegiatan	Jumlah
1	Jumlah fasilitasi pelatihan kewirausahaan 250 orang dan pelatihan desain dan kemasan produk UKM 50 pelaku UKM	300 Orang
2	Jumlah Fasilitasi pendampingan kelembagaan UMKM	550 Unit Usaha
3	Jumlah fasilitasi pemasaran UMKM	15 Unit Usaha
4	Jumlah fasilitasi akses permodalan dan pembiayaan	11 unit usaha
5	Pertumbuhan Wirausaha Baru	550 Unit usaha
6	Jumlah fasilitasi standarsasi dan legalitas usaha - Pembuatan NIB (210 UKM) - Pembuatan Sertifikat Halal (10 UKM) - Usulan Perizinan Industri Rumah Tangga (10 UKM) - Rekomendasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) 26 UKM	256 Unit usaha
7	Jumlah fasilitasi desain dan kemasan	166 Unit usaha

Tabel 3.14.
Jumlah UMKM yang meningkat labanya
Kota Bandar Lampung Tahun 2021 s/d 2025

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Jumlah UMKM yang meningkat labanya	430	580	650	1.115	1.225
Jumlah UMKM yang dalam pengawasan	1.899	1.899	1.899	1.899	1.899
Persentase UMKM yang meningkat labanya	22,64	30,54	34,20	60,55	64,50

Gambar 1.3. Cascading Program/Kegiatan Dalam Upaya Mencapai Target Persentase UMKM Yang Meningkatkan Labanya



Sasaran 3 “MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH” memiliki 1 (satu) indikator yaitu :

Indikator sasaran “ Hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung”

Tabel 3.15.
Penghitungan Pencapaian Sasaran Dua

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Hasil penilaian Lakip oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Predikat LAKIP)	77,55	74,45%	81,30	-	Belum ada penilaian

Pada tabel dijelaskan bahwa indikator Hasil penilaian Lakip oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Predikat LAKIP) jika dibandingkan pada tahun 2023 realisasi 77,55 skor dan tahun 2024 realisasi 74,45 skor maka ada penurunan penilaian LAKIP sampai dengan tahun 2024 namun Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung melakukan penyesuaian indikator sasaran dari level pimpinan hingga level sub-kegiatan agar setiap unit kerja memiliki tanggung jawab yang jelas. Untuk tahun 2025 Hasil penilaian Lakip oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Predikat LAKIP) dengan target 81,30 skor namun realisasi tahun 2025 belum ada penilaian.

Upaya yang akan dilakukan :

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2024 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi akan melakukan:

1. Melakukan Monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja dan keselarasan dokumen SAKIP, dan Menerapkan Reward and Punishment atas capaian kinerja masing-masing bidang dan individu;
2. Melakukan Koordinasi dengan pihak Inspektorat kaitan dengan peningkatan SAKIP di Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah.

Faktor Pendukung :

Capaian Nilai AKIP yang terus meningkat tidak terlepas dari kinerja bagian sekretariat sebagai penanggungjawab. Didukung oleh satu program yaitu Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dan enam kegiatan yaitu Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dan Pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah. Pada bagian Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdapat dua sub bagian, yaitu sub bagian Kepegawaian dan Sub bagian Program, Keuangan dan Aset.

3.2.2. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja untuk untuk 3 (tiga) sasaran dapat dilaksanakan melalui 6 (enam) program, 12 (dua belas) kegiatan, dan 23 (dua puluh kegiatan) sub kegiatan dengan tingkat capaian kinerja kegiatan 100%. Realisasi program dan kegiatan di Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung Tahun 2025 **dengan total anggaran Rp.9.317.719.882,00 dan realisasi Rp.8.163.397.571,00 (87,61%)** dengan uraian sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator :

- Cakupan Pemenuhan Kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah target 98% dengan Realisasi 98% persentase pencapaian 100%

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator :

- Persentase pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah target 100% dengan realisasi 100% persentase pencapaian 100%

1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan Total Jumlah Anggaran Rp. 84.023.224,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 82.297.793,00 atau sebesar (97,71%).

Realisasi Kinerja Output adalah Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (100%) **dengan hasil** yang dicapai tersedianya Laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 5 Laporan.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator :

- Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang akuntabel target 100% dan Realisasi 100% persentase pencapaian 100%
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan Total Jumlah Anggaran Rp. 2.928.391.230,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.2.256.448.595,00 atau sebesar (77,05%). **Realisasi Kinerja Output** adalah Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN **dengan hasil** terpenuhinya jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 19 orang/bulan
- 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ verifikasi Keuangan SKPD dengan Total Jumlah Anggaran Rp. 68.682.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 63.752.000,00 atau sebesar (92,82%). **Realisasi Kinerja Output** adalah jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD 100%.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator :

- Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang akuntabel target 100% dan Realisasi 100% persentase pencapaian 100%
- 1) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan Total Jumlah Anggaran Rp. 15.000.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0 atau sebesar (0,00%). **Realisasi Kinerja Output** adalah Jumlah

pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebanyak 0 orang (0%).

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator :

- Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD target 98% dan realisasi 98% persentase pencapaian 100%
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Total Jumlah Anggaran Rp. 27.231.317,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 25.179.197,00 atau sebesar (92,46%). **Realisasi Kinerja Output** adalah jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **dengan hasil** yang dicapai yaitu jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan sebanyak 1 paket (100%).
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan Total Jumlah Anggaran Rp. 5.050.527,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.989.672,00 atau sebesar (98,80%). **Realisasi Kinerja Output** adalah jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **dengan hasil** jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan sebanyak 1 paket (100%).
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan Total Jumlah Anggaran Rp. 21.000.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 15.759.000,00 atau sebesar (75,04%). **Realisasi Kinerja Output** adalah jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan **dengan hasil** jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan sebanyak 1 paket.

- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan Total Jumlah Anggaran Rp. 26.999.019,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 23.545.997,00 atau sebesar (87,21%). **Realisasi Kinerja Output** adalah jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan **dengan hasil** yang dicapai yaitu jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan sebanyak 1 paket (100%).
- 5) Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan Total Jumlah Anggaran Rp.5.400.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.5.400.000,00 atau sebesar (100%). **Realisasi Kinerja Output** adalah jumlah dokumen bahan bacaan kantor dan peraturan perundang-undangan yang tersedia **dengan hasil** yang dicapai yaitu jumlah dokumen bahan bacaan kantor dan peraturan perundang-undangan yang tersedia sebanyak 1 Dokumen (100%).
- 6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan Total Jumlah Anggaran Rp.84.460.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.62.497.336,00 atau sebesar (74,00%). **Realisasi Kinerja Output** adalah jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD **dengan hasil** yang dicapai yaitu jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebanyak 1 Laporan (100%).

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator :

- Pemenuhan Kebutuhan Inventaris target 98% dan realisasi 98% persentase pencapaian 97,65%

- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dengan Total Jumlah Anggaran Rp.24.112.092,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.23.532.000,00 atau sebesar (97,59%).
Realisasi Kinerja Output adalah jumlah paket mebel yang disediakan **dengan hasil** jumlah paket mebel yang disediakan sebanyak 22 unit(100%).
- 2) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya dengan Total Jumlah Anggaran Rp.45.301.520,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.41.125.500,00 atau sebesar (90,78%).
Realisasi Kinerja Output adalah jumlah paket pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **dengan hasil** paket pengadaan peralatan dan mesin lainnya disediakan sebanyak 11 unit(100%).

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator :

- Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD target 98% dan realisasi 98% persentase pencapaian 100%
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik dengan Total Jumlah Anggaran Rp.85.192.848,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.71.883.844,00 atau sebesar (84,38%). **Realisasi Kinerja Output** adalah jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **dengan hasil** tersedianya rekening pembayaran telepon dan langganan internet sebanyak 12 laporan (100%).
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan Total Jumlah Anggaran Rp.518.400.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.500.400.000,00 atau sebesar

(96,53%). **Realisasi Kinerja Output** adalah jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan **dengan hasil** jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan sebanyak 12 laporan (100%)

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah

Indikator :

- Inventaris kantor yang terpelihara target kinerja 98% dan realisasi 8% persentase pencapaian 100%

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dengan Total Jumlah Anggaran Rp.40.170.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.39.774.086,00 atau sebesar (99,01%).

Realisasi Kinerja Output adalah jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya **dengan hasil** jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya sebanyak 1 unit (100%).

- 2) Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan operasional atau lapangan dengan Total Jumlah Anggaran Rp.19.250.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.18.432.011,00 atau sebesar (95,75%). **Realisasi Kinerja Output** adalah jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya **dengan hasil** jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya sebanyak 5 unit (100%).

- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan Total Jumlah Anggaran Rp.7.830.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.5.430.000,00 atau sebesar (69,35%). **Realisasi Kinerja Output** adalah jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **dengan hasil** jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara sebanyak 11 Unit (100%).

Pada tahun Anggaran 2025, Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan bidang Koperasi dan UKM dengan melaksanakan beberapa Program dan Kegiatan Strategis. Selanjutnya, Program dan Kegiatan yang menunjang pelaksanaan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah adalah sebagai berikut :

II. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Indikator :

- Koperasi aktif target 47,85% dan realisasi kinerja 54,48% dengan persentase pencapaian 178,03%.

Indikator Program pada Persentase Koperasi aktif dengan formula: Jumlah koperasi aktif dibagi jumlah seluruh koperasi dikali 100%.

Persentase koperasi aktif realisasi 54,48% terdapat dari Jumlah koperasi aktif di Kota Bandar Lampung sebanyak 316 koperasi dengan jumlah seluruh koperasi di Kota Bandar Lampung sebanyak 580 koperasi.

8. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaanya

Indikator :

- Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi yang dinilai Kesehatanya untuk koperasi target 37,50% dan realisasi kinerja 25,75% dengan persentase pencapaian 68,68%.

Indikator Program pada Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi yang dinilai Kesehatanya untuk koperasi dengan formula :

Jumlah Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi yang dinilai Kesehatannya Dibagi Jumlah Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi yang ada di Kali 100%.

Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi yang dinilai Kesehatannya untuk koperasi realisasi 25,75% terdapat dari Jumlah Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi yang dinilai Kesehatannya sebanyak 119 koperasi dengan jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi sebanyak 462 koperasi.

- 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Total Jumlah Anggaran Rp.75.052.192,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp.73.782.000,00 atau sebesar (98,31%)

Realisasi Kinerja Output adalah Jumlah usaha simpanpinjam Yang dinilai kesehatannya untuk koperasi (100%) **dengan hasil** jumlah usaha simpan pinjam yang dinilai kesehatannya sebanyak 110 Unit Usaha.

III. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Indikator :

- Pertumbuhan jumlah anggota Koperasi target 0,50% dan realisasi 3,45% dengan persentase pencapaian 690%.
Indikator Program pada Pertumbuhan jumlah anggota Koperasi dengan formula : Jumlah anggota koperasi tahun ini – jumlah anggota koperasi tahun lalu dikali 100%.
Realisasi 3,45% terdapat dari jumlah anggota Koperasi tahun ini 69.853 orang dikurang jumlah anggota koperasi tahun lalu 67.518 orang
- Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan koperasi target 60,00% dan realisasi 52,06% dengan persentase pencapaian 86,76%.Realisasi 52,06% terdapat dari Koperasi yang mengikuti pelatihan sebanyak 302 koperasi dengan jumlah koperasi yang ada sebanyak 580 koperasi.

9. Kegiatan Pendidikan dan Latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi dengan Total Jumlah Anggaran Rp.40.481.016,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp.39.760.969,00 atau sebesar (98,22%).

Realisasi Kinerja Output adalah Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (100%) **dengan hasil** Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian sebanyak 50 orang.

IV. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Indikator :

- Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi target 5,38% dan realisasi 0,80% dengan persentase pencapaian 14,86%.

Indikator Program pada Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi dengan formula : $\text{Volume usaha tahun ini} - \text{volume usaha tahun lalu} / \text{volume usaha tahun lalu} \times 100\%$.

Realisasi 0,80% terdapat dari volume usaha tahun ini 477.080 Milyar dikurangi volume usaha tahun lalu 473.248 Milyar.

Tidak tercapainya indikator pertumbuhan volume usaha koperasi dikarenakan pada tahun 2025 ada penambahan koperasi baru sebanyak 166 koperasi terdiri dari koperasi merah putih sebanyak 126 koperasi dan Non koperasi merah putih sebanyak 40 koperasi namun penambahan koperasi baru ini belum dapat menjalankan usaha nya sehingga tidak terdapat penambahan pada volume usaha tersebut.

- Persentase Fasilitasi Penerbitan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) target 29,54% dan realisasi 18,10% dengan persentase pencapaian 61,27%

Indikator Program pada Persentase Fasilitasi Penerbitan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) dengan formula : Jumlah

koperasi yang telah diterbitkan Sertifikat Nomor Induk (NIK) / Jumlah koperasi yang ada dikali 100%.

Persentase Fasilitasi Penerbitan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) realisasi 29,54% terdapat dari Jumlah koperasi yang telah diterbitkan Sertifikat Nomor Induk (NIK) sebanyak 105 NIK dengan Jumlah koperasi yang ada sebanyak 580 Koperasi.

10. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Indikator :

- Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi target 1,26% realisasi 0,86% dengan persentase pencapaian 68,25%.

Indikator Program pada Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan formula : Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran di bagi Jumlah koperasi yang ada di kali 100%.

Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi target 1,26% realisasi 0,86% dengan persentase 68,25% pencapaian terdapat dari Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran sebanyak 5 koperasi dengan Jumlah koperasi yang ada sebanyak 580 Koperasi.

- 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota. Dengan Total Jumlah Anggaran Rp.1.000.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.951.533.788,00 atau sebesar (95,15%). **Realisasi Kinerja Output** adalah Jumlah koperasi yang Difasilitasi Kemitrannya **dengan hasil** Jumlah koperasi yang Difasilitasi Kemitrannya sebanyak 126 unit usaha (100%).

- 2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Koperasi dengan keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota. Dengan Total Jumlah Anggaran Rp.100.364.245,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp.41.193.638,00 atau sebesar (41.04%). **Realisasi Kinerja Output** adalah koperasi dengan keanggotaan daerah kabupaten/kota **dengan hasil** koperasi dengan keanggotaan daerah kabupaten/kota sebanyak 50 unit usaha 100% (Temu bisnis & pelatihan SDM Koperasi Merah Putih, bantuan Modal Usaha untuk UKM penerima bantuan sepeda gerobak, Monitoring 126 Koperasi Kelurahan Merah Putih, terselenggaranya bazar& Pameran UKM bersama lembaga vertical, Pemberian spanduk 126 kelurahan Koperasi Merah Putih sesuai wilayah; souvenir; buku panduan tata laksana Koperasi Merah Putih)

V. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

Indikator :

- Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro target 26,80% dan realisasi 28,96% persentase pencapaian 108,05%.
Indikator Program pada Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro dengan formula : $\text{Jumlah pertumbuhan wirausaha baru} \div \text{Jumlah wirausaha yang ada} \times 100\%$
Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro realisasi 28,96% terdapat dari Jumlah pertumbuhan wirausaha baru dibagi Jumlah wirausaha yang ada sebanyak 550 unit usaha dengan Jumlah wirausaha yang ada sebanyak 1.899 unit usaha.
- Persentase UKM non BPR LKM Aktif target 42,75% dan realisasi 33,02% dengan persentase pencapaian 77,23%
Indikator Program pada Persentase UKM non BPR LKM Aktif dengan formula : $\text{Jumlah UKM Non BPR/LKM Aktif} \div \text{jumlah seluruh UMKM Non BPR/LKM Aktif} \times 100\%$
Persentase UKM non BPR LKM Aktif realisasi 33,02%

terdapat dari Jumlah UKM Non BPR/LKM Aktif sebanyak 21.138 unit usaha dengan jumlah seluruh UMKM Non BPR/LKM Aktif sebanyak 64.000 unit usaha.

- Persentase BPR/LKM Aktif target 100% dan realisasi 100% dengan persentase pencapaian 100%

Indikator Program pada Persentase BPR/LKM Aktif dengan formula : Sumber data Jumlah BPR yang dikeluarkan Oleh OJK.

Persentase BPR/LKM Aktif realisasi 100% terdapat dari Jumlah BPR/LKM Aktif sebanyak 23 BPR/LKM Aktif.

Capaian Persentase BPR/LKM Aktif tahun ini dibandingkan terhadap target akhir renstra (100%) telah mencapai 100%

11. Kegiatan Pemberdayaan Kegiatan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi

Indikator :

- Persentase jumlah Usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikat produk target 4,20% dan realisasi 13,48% dengan persentase pencapaian 320,97%

Indikator kegiatan pada Persentase jumlah Usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikat produk dengan formula : Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi di bagi Jumlah usaha mikro yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk di kali 100%

Persentase jumlah Usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikat produk realisasi 6,74% terdapat dari Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi sebanyak 256 unit usaha dengan Jumlah usaha mikro yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk sebanyak 1.899 unit usaha.

- Rasio Usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan target 7,80% dan realisasi 3,66% dengan persentase pencapaian 46,92%

Indikator kegiatan pada Rasio Usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan dengan formula : Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan di bagi Jumlah usaha mikro yang ada di kali 100%

Rasio Usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan realisasi 46,92% terdapat dari Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan sebanyak 1.569 unit usaha dengan Jumlah usaha mikro yang ada sebanyak 42.862 unit usaha. Fasilitasi pelatihan bagi usaha mikro pada tahun 2024 terdapat 1.269 orang dan tahun 2025 terdapat 300 orang sehingga sampai dengan tahun 2025 untuk fasilitasi pelatihan sebanyak 1.569 orang.

- 1) Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro
Dengan Total Jumlah Anggaran Rp.3.000.000.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.2.851.932,00 atau sebesar (95,06%).

Realisasi Kinerja Output adalah jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usah mikro **dengan hasil** jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usah mikro sebanyak 100 unit usaha 100% (Bantuan gerobak sepeda listrik 100 UKM).

- 2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro. Dengan Total Jumlah Anggaran Rp.572.579.906,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.496.734.211,00 atau sebesar (86,75%).

Realisasi Kinerja Output adalah jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan pendampingan terhadap usaha mikro **dengan hasil** jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan pendampingan terhadap usaha mikro sebanyak 300 unit usaha 100% (Pendampingan pembuatan perizinan

NIB, Sertifikat halal, P-IRT, HAKI, pendampingan pemasaran produk UKM ke toko oleh-oleh, pendampingan program EKOR).

VI. Program Pengembangan UMKM

Indikator :

- Persentase Usaha mikro dan kecil target 68,50% dan realisasi 91,31% dengan persentase pencapaian 133,29%

Indikator program Persentase Usaha mikro dan kecil dengan formula : Jumlah usaha mikro dan kecil dibagi seluruh jumlah UMKM dikali 100%

Persentase Usaha mikro dan kecil realisasi 91,31% terdapat dari Jumlah usaha mikro dan kecil sebanyak 58.544 unit usaha dengan seluruh jumlah UMKM sebanyak 64.000 unit usaha.

- Pertumbuhan Produktivitas UMKM target 8,20% dan realisasi 25,11% dengan persentase pencapaian 306,21%

Indikator program Pertumbuhan Produktivitas UMKM dengan formula : Produktivitas UMKM tahun ini – produktivitas tahun lalu dibagi produktivitas UMKM tahun lalu dikali 100%
Pertumbuhan Produktivitas UMKM realisasi 25,11% terdapat dari Produktivitas UMKM tahun ini sebanyak 269 unit usaha dengan produktivitas tahun lalu sebanyak 215 unit usaha.

12. Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil

Indikator :

- Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran target 2,70% dan realisasi 6,74% dengan persentase pencapaian 249,64%

Indikator program Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran dengan formula :
Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran di bagi Jumlah usaha mikro yang belum

mendapatkan dukungan fasilitasi pemasaran di kali 100% Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran realisasi 6,74% terdapat dari Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran sebanyak 128 unit usaha dengan Jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan fasilitasi pemasaran sebanyak 1.899 unit usaha.

- 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro menjadi usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, pemasaran SDM serta Desain dan Teknologi dengan Total Jumlah Anggaran Rp.522.748.746,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 468.213.934,00 atau sebesar (89,57%). Realisasi **Kinerja Output** adalah jumlah unit usaha UMKM yang mendapatkan fasilitas produksi dan pengolahan pemasaran sumber daya manusia serta desain dan teknologi **dengan hasil** terlaksananya promosi dalam daerah dan luar daerah sebanyak 4 kali dengan pemasaran produk-produk UMKM sebanyak 50 unit usaha(100%).

Berikut adalah capaian indikator beserta target, realisasi maupun capaian pada program pembangunan yang tertuang dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2029 Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung :

Tabel 3.16
Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2025
Dokumen Renstra Tahun 2025-2029

Program	Indikator	Tahun 2025 (%)		
		Target	Realisasi	Capaian
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	18,42	20,51	111,35
Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	53,96	54,48	100,96
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	36,83	26,03	70,68
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	13,44	9,48	70,54
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Pertumbuhan Wirausaha	10,53	8,69	82,53
Program Pengembangan Umkm	Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor	0,05	0,04	80,00

Tabel 3.17.
Program dan Kegiatan untuk Pencapaian Kinerja

Dokumen Renstra Tahun 2021-2026

No	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabuten/Kota	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan Bidang Koperasi, usaha kecil dan menengah	98%	98%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	100%	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	5 Laporan	5 Laporan
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	100%	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	26 orang	26 orang
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100%	100%
	Sub Kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	5 orang	0
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD	98%	98%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	1 paket
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	1 paket	1 paket
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	1 paket
	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan kantor dan peraturan perundang undangan yang tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen

	Sub Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	98%	98%
	Sub Kegiatan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	22 Unit	22 Unit
	Sub Kegiatan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4 Unit	4 Unit
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan jasa penunjang kebutuhan OPD	98%	98%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Inventaris kantor yang terpelihara	98%	98%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	1 Unit
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	5 Unit	5 Unit
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	11 Unit	11 Unit
2	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi aktif	47,85%	54,48%
	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi	37,50%	25,75%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian KSP/USP Koperasi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	80 Unit Usaha	110 Unit Usaha
3	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pertumbuhan jumlah anggota koperasi	0,50%	3,45%
	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten Kota	Persentase kopersi yang mengikuti pelatihan	60,00%	52,06%

	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang memahami perkoperasian	50 Orang	50 Orang
4	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pertumbuhan volume usaha koperasi	5,38%	0,80%
		Persentase fasilitasi penerbitana Sertifikat Nomor induk Koperasi	29,54%	18,10%
	Kegiatan Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi	1,26%	0,86%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang keanggotaannya Daerah/Kab Kota	Jumlah koperasi yang di fasilitasi kemitraannya	126 Unit Usaha	126 Unit Usaha
	Sub Kegiatan Pemberdayaan koperasi dengan keanggotaan Daerah kabupaten/kota	Koperasi dengan keanggotaan daerah kabupaten/kota	50 Unit Usaha	50 Unit Usaha
5	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	26,80%	28,96%
		Persentase UKM Non BPR UKM Aktif	42,75%	33,02%
		Persentase BPR/LKM aktif	100%	100%
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikat induk	4,20%	13,48%
		Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	7,80%	3,66%
	Sub Kegiatan pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	100 unit usaha	100 unit usaha
	Sub Kegiatan pemberdayaan kelembagaan potensi pengembangan usaha mikro	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	300 unit usaha	300 unit usaha
6	Program Pengembangan UKM	Persentase usaha mikro dan kecil	68,50%	91,31%
		Pertumbuhan produktivitas UMKM	8,20%	25,11%
	Kegiatan Pengembangan Usaha mlkro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha kecil	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	2,70%	6,74%
	Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	Jumlah unit usaha UMKM yang mendapatkan fasilitas produksi dan pengolahan pemasaran sumber aya manusia serta desain dan teknologi	50 unit usaha	50 unit usaha

3.2.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut merupakan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung. Secara umum Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung telah dapat mencapai sasaran pembangunan secara efektif dan efisien sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 3.18.
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	Indikator Kerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkat- nya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi yang profesional dan Akuntabel	Pesentase koperasi sehat dan cukup sehat	72,07%	90,98%	Efisien
Meningkatnya Wirausaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Persentase UMKM yang meningkat labanya	93,20%	69,06%	Efisien
Rata-Rata capaian		82,63%	80,02%	

Pada uraian sasaran diatas dapat disimpulkan bahwa untuk dua indikator Pesentase koperasi sehat dan cukup sehat dan Persentase UMKM yang meningkat labanya penggunaan anggaran masih efektif jika dibandingkan dengan capaian kinerja. Sumberdaya diatas mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis dalam rangka rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi Dan UKM Kota Bandar Lampung dengan rata- rata capaian kinerja 82,63% dan rata-rata capaian anggaran 80,02%.

Berikut adalah alokasi anggara per indikator kinerja beserta realisasi anggarannya :

Tabel 3.19.

Alokasi per Sasaran Pembangunan

NO	Sasaran	Indikator Kerja	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran	% Realisasi
1	Meningkat- nya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi yang profesional dan Akuntabel	Pesentase koperasi sehat dan cukup sehat	1.215.897.453	1.106.270.395	90,98%
2	Meningkatnya Wirausaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Persentase UMKM yang meningkat labanya	4.095.328.652	3.816.880.145	93,20%
3	Meningkatnya penyelenggaraan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan usaha menengah	Hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh inspektorat kota (Nilai SAKIP OPD)	4.006.493.777	3.240.247.031	80,87%

3.3. REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran yang disediakan untuk program dan kegiatan pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung Tahun 2025 sebesar **Rp.5.840.935.330,00** Sedangkan realisasi anggaran adalah sebesar **Rp.4.563.613.156,00** dengan capaian kinerja **78,13%**. Anggaran untuk program/kegiatan prioritas sebesar **Rp.2.265.983.048,00** realisasi anggaran sebesar **Rp.1.566.625.068,00** dengan capaian kinerja sebesar **69,14%**. Sedangkan anggaran program/kegiatan pendukung sebesar **Rp.3.574.952.282,00** realisasi anggaran sebesar **Rp.2.996.988.088,00** dengan capaian kinerja **83,83%**

Anggaran dan realisasi keuangan Dinas koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.20.

Anggaran dan Realisasi Keuangan per Program/Kegiatan Tahun 2025
Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung

NO	BELANJA DAERAH	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
			(Rp)	%
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabuten/Kota	4.006.493.777	3.982.381.685	79,57
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84.023.224	82.097.793	97,71
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	84.023.224	82.097.793	97,71
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.997.073.230	2.268.185.009	83,87
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.928.391.230	2.204.433.009	75,28
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	68.682.000	63.752.000	92,82
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.000.000	0	0
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.000.000	0	0
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	170.140.863	137.371.202	80,73
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.231.317	25.179.197	92,46
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.050.527	4.989.672	98,80
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.000.000	15.759.000	75,04
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	26.999.019	23.545.997	87,21
	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.400.000	5.400.000	100
	Sub Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	84.460.000	62.497.336	74
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	43.086.548	42.100.000	93,14
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	43.086.548	42.100.000	97,59
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.301.520	41.125.500	90,78
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	603.592.848	572.283.844	94,81
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa	85.192.848	71.883.844	84,38

	Komunikasi, Sumber daya air dan listrik			
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	518.400.000	500.400.000	96,53
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	67.250.000	75.722.090	94,87
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.170.000	39.774.086	99,01
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Kendaraan Operasional atau Lapangan	19.250.000	18.432.011	95,75
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	7.830.000	5.430.000	69,35
III	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	75.052.192	73.782.000	98,31
	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	75.052.192	73.782.000	98,31
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	75.052.192	73.782.000	98,31
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	40.481.016	39.760.969	98,22
	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	40.481.016	39.760.969	98,22
	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	40.481.016	39.760.969	98,22
V	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	1.100.364.245	992.727.426	90,21
	Kegiatan Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.100.364.245	992.727.426	90,21
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000.000	951.533.788	95,15
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	100.364.245	41.193.638	41,04
VI	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	962.784.742	880.216.904	91,42
	Kegiatan Pemberdayaan Kegiatan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan	3.572.579.906	3.348.666.211	93,73

	Kelembagaan dan Koordinasi dengan para pemangku Kepentingan			
	Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui kemitraan Usaha Mikro	3.000.000.000	2.851.932.000	95,06
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	572.579.906	496.734.211	86,75
VII	Program Pengembangan UKM	522.748.746	468.213.934	89,57
	Kegiatan Pengembangan Usaha mlkro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha kecil	522.748.746	468.213.934	89,57
	Sub Kegiatan Produksi Dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain Dan Teknologi	522.748.746	468.213.934	89,57
	JUMLAH	9.317.719.882	8.163.397.571	
	Persentase Keuangan	87,61		

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi anggaran Dinas Koperasi Dan UKM Kota Bandar Lampung pada tahun 2025 sebesar Rp.8.163.397.571,00 dari total anggaran Rp.9.317.719.882,00 atau 87,61%. Jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran pada tahun 2024 maka mengalami kenaikan sebesar 55,90% yaitu pada tahun 2024 dari total anggaran sebesar Rp.5.840.935.330,00 terealisasi sebesar Rp.4.563.613.156,00 atau 78,13%.

BAB IV PENUTUP

1.1. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi serta dalam rangka perwujudan good governance. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Hasil laporan kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa Pencapaian Sasaran strategis :

1. **Meningkat- nya kinerja Kelembagaan dan usaha koperasi yang profesional dan akuntabel** terdapat satu indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur pada tahun 2025 :
 - Indikator sasaran **“Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat”** yang sudah mencapai target yang ditetapkan atau capaian kinerja sebesar 72,07% dengan kategori **“Baik”**.
2. **Meningkatnya wirausaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri** terdapat satu indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur pada tahun 2025 :
 - Indikator sasaran **“Persentase UMKM yang meningkat labanya”** yang sudah mencapai target yang ditetapkan atau capaian kinerja sebesar 144,29% dengan kategori **“Sangat Baik”**.

3. **Meningkatnya penyelenggaraan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Menengah** terdapat satu indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur pada tahun 2025 :

- Indikator sasaran “**Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh inspektorat Kota (Nilai SAKIP OPD)** dengan nilai BB (Tahun 2024)

1.2. SARAN

Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2025, maka untuk kedepannya, Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung akan mengevaluasi kembali target kinerja yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan kondisi data terakhir dan terus melakukan optimalisasi dalam meningkatkan pemberdayaan Koperasi dan UKM di Kota Bandar Lampung. Selain itu, Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung akan terus berupaya untuk meningkatkan koordinasi, baik internal maupun eksternal dengan instansi terkait lainnya dalam rangka mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan serta monitoring evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan, terutama selama tahun 2025.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2025 ini disusun sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban kepada publik. Selanjutnya, diharapkan laporan ini dapat menjadi referensi dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan serta mengoptimalkan pencapaian Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung di masa yang akan datang.